

Catatan atas Laporan Keuangan

AUDITED TAHUN 2025 TINGKAT UAKPA



Dibuat oleh :
PERENCANAAN, KEUANGAN, DAN BMN
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Utara di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tanjung Selor, 31 Desember 2025

Kepala Sekretariat,



Drs. Peri Mulia Siagian, M.Si

NIP. 19750222 199404 1 001

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	vi
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	7
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	9
II. NERACA.....	10
III. LAPORAN OPERASIONAL	11
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	12
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	13
A. PENJELASAN UMUM	13
A.1. Dasar Hukum	13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu dan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Utara	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5. Dasar Pengukuran.....	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	16
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	23
B.1. Pendapatan.....	24
B.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	24
B.3. Belanja	25
B.4. Belanja Pegawai	26
B.5. Belanja Barang	27
B.6. Belanja Modal	28
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	29
C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas	29
C.2. Persediaan.....	29
C.3. Tanah.....	31
C.4. Peralatan dan Mesin.....	31
C.5. Aset Tetap Lainnya.....	34
C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	35
C.7. Aset Tak Berwujud.....	36
C.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	36
C.9. Utang Kepada Pihak Ketiga	37
C.10. Utang Jangka Pendek Lainnya.....	38

C.11. Ekuitas	39
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	40
D.1. Beban Pegawai.....	40
D.2. Beban Persediaan	40
D.3. Beban Barang dan Jasa	41
D.4. Beban Pemeliharaan	42
D.5. Beban Perjalanan Dinas	42
D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi	43
D.7. Kegiatan Non Operasional.....	45
D.8. Pos Luar Biasa	46
D.9. Surplus/Defisit LO	46
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	47
E.1. Ekuitas Awal	47
E.2. Surplus/Defisit LO	47
E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	47
E.4. Transaksi Antar Entitas.....	48
E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas	50
E.6. Ekuitas Akhir	50
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.....	51
F.1. Pengungkapan Lainnya	51
F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi	52
F.3. Penjelasan Anggaran Prioritas Nasional	52
F.4. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP	52
F.5. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).....	53
LAMPIRAN.....	54

Daftar Tabel

Tabel 1 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	20
Tabel 2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel 3 Pagu Anggaran Belanja per 31 Desember 2025.....	23
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Pendapatan Per 31 Desember 2025 dan 2024	24
Tabel 5 Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin.....	25
Tabel 6 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu.....	25
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025	25
Tabel 8 Rincian Realisasi berdasarkan Program per 31 Desember 2025	26
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	26
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024.....	27
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024	28
Tabel 13 Perbandingan Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 2024	28

Tabel 13 Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas Per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	29
Tabel 14 Rincian Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum Disetor	29
Tabel 15 Perbandingan Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 2024	29
Tabel 16 Mutasi Nilai Persediaan	29
Tabel 17 Mutasi Tambah Persediaan per 31 Desember 2025.....	30
Tabel 18 Mutasi Kurang Persediaan per 31 Desember 2025	30
Tabel 19 Perbandingan Tanah Per 31 Desember 2025 dan 2024	31
Tabel 20 Mutasi Nilai Tanah	31
Tabel 21 Perbandingan Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2025	31
Tabel 22 Rincian Saldo Peralatan dan Mesin	31
Tabel 23 Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin	33
Tabel 24 Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin.....	33
Tabel 25 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan.....	34
Tabel 26 Perbandingan Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	34
Tabel 27 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya	34
Tabel 28 Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	35
Tabel 29 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Desember 2025.....	35
Tabel 30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2024	35
Tabel 31 Perbandingan Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	36
Tabel 32 Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	37
Tabel 33 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	37
Tabel 34 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Desember 2024	37
Tabel 35 Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	37
Tabel 36 Rincian Utang Pihak Ketiga	38
Tabel 37 Rincian Belanja Barang yang masih harus dibayar.....	38
Tabel 38 Rincian Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	38
Tabel 39 Rincian Utang Pajak Bendahara Pengeluaran.....	38
Tabel 40 Perbandingan Saldo Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024.....	40
Tabel 41 Rincian Mutasi Beban Pegawai.....	40
Tabel 42 Perbandingan Saldo Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	40
Tabel 43 Rincian Mutasi Saldo Beban Persediaan	41
Tabel 44 Perbandingan Saldo Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024	41
Tabel 45 Rincian Mutasi Saldo Beban Barang dan Jasa	42
Tabel 46 Perbandingan Saldo Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2025 dan 2024 ...	42
Tabel 47 Perbandingan Saldo Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024	43
Tabel 48 Rincian Mutasi Saldo Beban Perjalanan Dinas.....	43
Tabel 49 Perbandingan Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi	43
Tabel 50 Rincian Mutasi Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi	44
Tabel 51 Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan.....	44
Tabel 52 Perbandingan Saldo Surplus/Defisit Pelepasan Per 31 Desember 2025 dan 2024	45

Tabel 53 Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	45
Tabel 54 Perbandingan Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	45
Tabel 55 Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan non Operasional Lainnya Per 30 Desember 2025	46
Tabel 56 Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	47
Tabel 57 Rincian Saldo Lain-lain per 31 Desember 2025	48
Tabel 58 Perbandingan Saldo Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2025 dan 2024	48
Tabel 59 Rincian Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain	48
Tabel 60 Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	49
Tabel 61 Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu	49
Tabel 62 Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin	50
Tabel 63 Perbandingan Saldo Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024	50
Tabel 64 Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	51
Tabel 65 Rincian Pergantian Pejabat Perbendaharaan	51
Tabel 66 Realisasi dan Capaian Output Program Prioritas Nasional	52

Jalan Jenderal Sudirman No. 28 Tanjung Selor 77212

Email: set.kaltara@bawaslu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Audited Tahun 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Tanjung Selor, 31 Desember 2025

Kepala Sekretariat,


Drs. Ireni Mulia Siagian, M.Si

NIP. 19750222 199404 1 001

Laporan Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Audited 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan 31 Desember 2025 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp322.810.000,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara sampai 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp29.014.934.893,00 atau mencapai 87,57 persen dari alokasi Anggaran TA. 2025 sebesar Rp33.132.147.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.705.143.068,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp13.600,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.705.129.468,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp50.613.936,00 dan Rp4.654.529.132,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp30.178.112.180,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp30.178.112.180,00.

Terdapat Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional yaitu Surplus Pelepasan Aset sebesar Rp246.010.000,00. Surplus dari Kegiatan Operasional Lainnya sebesar Rp76.800.000,00. Jumlah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp322.810.000,00. Defisit sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp29.855.302.180,00. Hasil dari pelaporan tersebut entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp29.855.302.180,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp21.321.682.193,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp29.855.302.180,00 ditambah Koreksi-koreksi yang

mengurangi Ekuitas sebesar Rp3.750.693.006 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp16.938.842.125,00 dan Penurunan Ekuitas sebesar Rp16.667.153.061,00 sehingga Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.654.529.132,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.

I.LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	REF	31-Des-25		% thd Angg	31-Des-24		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI	
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.1						
I. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak							
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2	0	322.810.000	0	0	25.104.821	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	322.810.000	0	0	25.104.821	0
B. Belanja Negara	B.3						
I. Belanja Pemerintah Pusat							
Belanja Pegawai	B.4	9.695.176.000	9.532.713.486	98,32	8.934.115.000	7.805.341.863	87,37
Belanja Barang	B.5	23.436.971.000	19.482.221.407	83,13	146.544.778.000	117.667.182.233	80,29
Belanja Modal	B.6	0	0	0	5.403.088.000	4.906.052.405	90,80
Jumlah Belanja Negara		33.132.147.000	29.014.934.893	88	160.881.981.000	130.378.576.501	81

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31-Des-25	31-Des-24	Kenaikan (Penurunan)	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	13.600	15.376.161.352	(15.376.147.752)	(100,00)
Persediaan	C.2	0	4.785.000	(4.785.000)	(100,00)
JUMLAH ASET LANCAR		13.600	15.380.946.352	(15.380.932.752)	(100,00)
ASET TETAP					
Tanah	C.3	243.973.332	243.973.332	0	0,00
Peralatan dan Mesin	C.4	11.092.574.304	12.553.856.104	(1.461.281.800)	(11,64)
Aset Tetap Lainnya	C.5	249.977.405	249.977.405	0	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.6	(6.881.395.573)	(7.013.183.495)	131.787.922	(1,88)
JUMLAH ASET TETAP		4.705.129.468	6.034.623.346	(1.329.493.878)	(22,03)
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.7	45.520.000	45.520.000	0	0,00
AKUMULASI PENYUSUTAN /AMORTISASI	C.8	(45.520.000)	(45.520.000)	0	0,00
ASET LAINNYA		0	0	0	0,00
JUMLAH ASET		4.705.143.068	21.415.569.698	(16.710.426.630)	(78,03)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.9	50.600.336	91.884.205	(41.283.869)	(44,93)
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.10	13.600	2.003.300	(1.989.700)	(99,32)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		50.613.936	93.887.505	(43.273.569)	(46,09)
JUMLAH KEWAJIBAN		50.613.936	93.887.505	(43.273.569)	(46,09)
EKUITAS					
Ekuitas	C.11	4.654.529.132	21.321.682.193	(16.667.153.061)	(78,17)
JUMLAH EKUITAS		4.654.529.132	21.321.682.193	(16.667.153.061)	(78,17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.705.143.068	21.415.569.698	(16.710.426.630)	(78,03)

III.LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31 Desember 2025	31 Desember 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0	0	0	-
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0	0
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	9.562.427.615	7.790.046.790	1.772.380.825	22,752
Beban Persediaan	D.3	6.730.500	598.493.100	(591.762.600)	(98,875)
Beban Barang dan Jasa	D.4	7.951.005.252	58.356.503.825	(50.405.498.573)	(86,375)
Beban Pemeliharaan	D.5	1.328.681.754	1.692.315.701	(363.633.947)	(21,487)
Beban Perjalanan Dinas	D.6	10.129.590.903	57.699.282.005	(47.569.691.102)	(82,444)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.199.676.156	1.052.943.642	146.732.514	13,935
JUMLAH BEBAN		30.178.112.180	127.189.585.063	(97.011.472.883)	(76,273)
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(30.178.112.180)	(127.189.585.063)	97.011.472.883	(76,273)
KEGIATAN NON OPERASIONAL				-	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.8	246.010.000	16.569.821	229.440.179	-
Pendapatan Pelepasan Aset	D.9	246.010.000	16.569.821	229.440.179	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.10	76.800.000	8.535.000	68.265.000	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	76.800.000	8.535.000	68.265.000	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		322.810.000	25.104.821	297.705.179	1.185,849
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	D.13	(29.855.302.180)	(127.164.480.242)	97.309.178.062	(76,522)
POS LUAR BIASA					
Beban Luar Biasa		0,00	0,00	0,00	
SURPLUS/DEFISIT LO	D.14	(29.855.302.180)	(127.164.480.242)	97.309.178.062	(76,522)

IV.LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	REF	31-Des-25	31-Des-24	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
EKUITAS AWAL	E.1	21.321.682.193	27.627.911.703	(6.306.229.510)	(22,83)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(29.855.302.180)	(127.154.480.242)	97.299.178.062	(76,52)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	(3.750.693.006)	8.010.000	(3.758.703.006)	(46.925,13)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.3.1	(1.774.800)	8.010.000	(9.784.800)	(122,16)
LAIN-LAIN	E.3.2	(3.748.918.206)	0	(3.748.918.206)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	16.938.842.125	120.840.240.732	(103.901.398.607)	(85,98)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(16.667.153.061)	(6.306.229.510)	(10.360.923.551)	164,30
EKUITAS AKHIR	E.6	4.654.529.132	21.321.682.193	(16.667.153.061)	(78,17)

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0517/BAWASLU/SJ/KU.02/XII/2025 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1220)
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-86/PB/2026 Hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2025 Audited tanggal 6 April 2026.
21. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-115.01-0/2025 Tanggal 23 November 2025

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rencana Strategis Bawaslu dan Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Utara

Bawaslu ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 70 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 89 bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu.

Visi Bawaslu

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”.

Penjelasan Visi:

Penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas. Proses penyelenggaraan Pemilu khususnya pencegahan dan pengawasan harus melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholders) Pemilu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu di semua tahapan Pemilu, dimana tujuan akhirnya adalah Bawaslu dapat berkembang menjadi

lembaga yang paling dipercaya dan diandalkan oleh rakyat Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata terpercaya, adalah sebagai berikut.

Tepercaya:

Melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Misi Bawaslu

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025-2025. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih.

Tujuan Bawaslu

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, memperkuat peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kegiatan penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu;
3. Mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya

A.4. Basis Akuntansi

Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
 - d. (*Kementerian Negara/Lembaga agar menyesuaikan pengakuan Pendapatan-LO sesuai karakteristik pendapatan masing-masing entitas)
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup Kas dan setara Kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	
--	---	--

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

(6) Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar

nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara
- sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

(7) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

(8) Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud,

tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software/Aplikasi Komputer	4
Lisensi	10

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(9) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(10) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 13 (tiga belas) kali. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Tabel 3

Pagu Anggaran Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Per 31 Desember 2025	
	ANGGARAN	
	AWAL	REVISI TERAKHIR
Pendapatan		
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja :		
Belanja Pegawai	6.700.070.000	9.695.176.000
Belanja Barang	11.136.034.000	23.436.971.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	17.836.104.000	33.132.147.000
Pinjaman dan Hibah:		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	-	-
Belanja Modal	-	-
Jumlah Pinjaman dan Hibah	-	0
Total	17.836.104.000	33.132.147.000

Revisi dijelaskan sebagai berikut:

1. Revisi pertama merupakan revisi DJA dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Daerah Tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu RI, Nomor 7 Tahun 2025, Tanggal 7 Februari 2025.
2. Revisi kedua merupakan revisi Kanwil DJPB untuk penyesuaian rencana penarikan dana halaman III DIPA Petikan Januari s/d Maret 2025.
3. Revisi ketiga merupakan revisi DJA untuk penambahan pagu anggaran non operasional kegiatan relaksasi penguatan kelembagaan
4. Revisi keempat merupakan revisi Kanwil DJPB untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kerja (Pemenuhan terhadap kebijakan kelembagaan) dan penyesuaian rencana penarikan dana halaman III DIPA Petikan April s/d Desember 2025.
5. Revisi kelima merupakan revisi Kanwil DJPB untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kerja (Pemenuhan terhadap kebijakan kelembagaan)
6. Revisi keenam merupakan revisi DJA untuk Penambahan Pagu Anggaran Belanja Pegawai

7. Revisi ketujuh merupakan revisi Kanwil DJPB untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan (Penyesuaian terhadap Belanja Pegawai)
8. Revisi kedelapan merupakan revisi DJA untuk Penambahan Pagu Anggaran Belanja Non Operasional
9. Revisi kesembilan merupakan revisi Kanwil DJPB untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kerja (Pemenuhan terhadap kebijakan kelembagaan)
10. Revisi kesepuluh merupakan revisi Kanwil DJPB untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kerja (Pemenuhan terhadap kebijakan kelembagaan) dan penyesuaian rencana penarikan dana halaman III DIPA Petikan Desember s/d Desember 2025.
11. Revisi kesebelas merupakan revisi Kanwil DJPB untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kerja Pemenuhan Gaji PPPK Paruh Waktu.
12. Revisi kedua belas merupakan revisi Kanwil DJPB untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kerja Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai
13. Revisi ketiga belas merupakan revisi Kanwil DJPB untuk Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kerja Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Tahun 2025

Pendapatan
Rp322.810.000,00

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp322.810.000,00 dan Rp25.104.821,00 dan mengalami peningkatan dari Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4
Perbandingan Realisasi Pendapatan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	2025	2024	Naik Turun%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	322.810.000,00	25.104.821,00	1.185,849
Jumlah	322.810.000,00	25.104.821,00	1.185,849

B.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Penerimaan Negara
Bukan Pajak*
Rp322.810.000,00

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp322.810.000,00 dan Rp25.104.821,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan dari 2024 karena pada tahun 2025 terdapat Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp246.010.000,00 dan Rp76.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin adalah Lelang Wajib Non Eksekusi BMN sebesar Rp246.010.000 berupa 3 unit Station Wagon dikarenakan kondisi rusak berat dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5

Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

No	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Keterangan	Nomor Risalah Lelang	NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Toyota New Kijang Innova V M/T 2.0 Vin 2, Kijang Innova	2015	Rusak Berat	RL-109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025	A2B7E2G503H8TEI4	26 November 2025	100.979.000
2	Toyota New Kijang Innova V M/T Lux Bensir, Kijang Innova Lux	2015	Rusak Berat	RL-109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025	A2B7E2G503H8TEI4	26 November 2025	84.079.000
3	Toyota All New Hilux Double Cabin G M/T, Grand New Hilux 4x4 Diesel	2015	Rusak Berat	RL-130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025	9E0CA2G503JTK3JS	16 Desember 2025	60.952.000
JUMLAH							246.010.000

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp76.800.000,00

Tabel 6

Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian Pokja dukungan administrasi hibah pemilihan Bulungan	E74322G502PF9M9H	27 Maret 2025	46.800.000
2	Pengembalian belanja tarakan (media tvri)	813A33CIFTBL4K8M	21 Maret 2025	30.000.000
JUMLAH				76.800.000

Realisasi Belanja
Rp29.014.934.893,00

B.3. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada Per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp29.014.934.893,00 atau 87,57 persen dari Anggaran belanja sebesar Rp33.132.147.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 7

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025

Uraian	Per 31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.695.176.000	9.533.083.586	98,33
Belanja Barang	23.436.971.000	19.482.581.407	83,13
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	33.132.147.000	29.015.664.993	87,58
Pengembalian		730.100	
Jumlah	33.132.147.000	29.014.934.893	87,57

Komposisi Anggaran dan Realisasi belanja per 31 Desember 2025 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi berdasarkan program sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 8
Rincian Realisasi berdasarkan Program per 31 Desember 2025

PROGRAM		ANGGARAN	REALISASI	%
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	14.619.541.000,00	10.856.807.685,00	74,26
WA	Program Dukungan Manajemen	18.512.606.000,00	18.158.127.208,00	98,09
JUMLAH		33.132.147.000,00	29.014.934.893,00	87,57

Dibandingkan dengan Per 31 Desember 2025, Realisasi Belanja Per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 77,75 persen. Hal ini disebabkan karena masa tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah selesai.

Tabel 9
Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9.532.713.486	7.805.341.863	22,13
Belanja Barang	19.482.221.407	117.667.182.233	(83,44)
Belanja Modal	-	4.906.052.405	(100,00)
Jumlah	29.014.934.893	130.378.576.501	(77,75)

Belanja Pegawai
Rp7.805.341.863,00

B.4. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.532.713.486,00 dan Rp7.805.341.863,00. Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp9.532.713.486,00 dan mengalami kenaikan sebesar 98,32 persen dari Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pelantikan PPPK 38 orang dan kenaikan gaji berkala PNS.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Pegawai
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.505.856.626,00	1.203.925.534,00	25,08
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.975.713.832,00	3.797.187.602,00	(21,63)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.068.603.784,00	852.587.282,00	142,63
Belanja Lembur	34.294.000,00	0,00	#DIV/0!
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	2.948.615.344,00	1.951.643.470,00	51,08
Jumlah Belanja Kotor	9.533.083.586,00	7.805.343.888,00	22,14
Pengembalian Belanja Pegawai	370.100,00	2.025,00	
Jumlah Belanja	9.532.713.486,00	7.805.341.863,00	22,13

Realisasi Belanja Pegawai tersebut seluruhnya berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) yang dipergunakan untuk:

1. Pembayaran gaji dan tunjangan PNS Bulan Januari s.d. Desember 2025;
2. Pembayaran gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bulan Januari s.d. Desember 2025;
3. Pembayaran tunjangan kinerja PNS Bulan Januari s.d. Mei 2025;
4. Pembayaran tunjangan kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bulan Januari s.d. Desember 2025;
5. Pembayaran uang makan PNS Bulan Januari s.d. Desember 2025;
6. Pembayaran uang kehormatan Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Bulan Januari s.d. Desember 2025;
7. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas bagi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025.
8. Pembayaran Uang Lembur bagi PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025.

Belanja Barang
Rp19.482.221.407,00

B.5. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan Per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp19.482.221.407,00 dan Rp117.667.182.233,00. Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 95,83 persen dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masa tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah selesai.

Tabel 11
Perbandingan Belanja Barang Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	4.120.720.401	17.536.131.767	(76,50)
Belanja Barang Non Operasional	1.011.149.936	20.048.573.465	(94,96)
Belanja Barang Persediaan	1945500,00	23.519.500	(91,73)
Belanja Jasa	2.831.632.713	20.955.335.752	(86,49)
Belanja Pemeliharaan	1.328.681.754	1.692.955.701	(21,52)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.188.451.103	59.582.327.124	(82,90)
Jumlah Belanja Kotor	19.482.581.407	119.838.843.309	(83,74)
Pengembalian Belanja	360.000	2.171.661.076	(100,00)
Jumlah Belanja	19.482.221.407	117.667.182.233	(83,44)

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp19.482.221.407,00 berasal dari sumber dana rupiah murni (RM) yang dipergunakan untuk:

1. Belanja kebutuhan operasional yang digunakan setiap hari;
2. Sewa gedung Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
3. Honor KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, PPSPM, dan staf pengelola keuangan;
4. Belanja pemeliharaan kendaraan dinas;
5. Supervisi peningkatan kapasitas pembuatan kajian putusan penyelesaian sengketa;
6. Supervisi dan monitoring peningkatan kapasitas dan penguatan divisi pencegahan partisipasi masyarakat dan humas kabupaten/kota

Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp360.000,00 yang merupakan pengembalian kelebihan belanja perjalanan dinas.

Belanja Modal
Rp0,00

B.6. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp4.906.052.405,00. Realisasi Belanja Modal pada Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 100 persen dibandingkan Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2025 tidak ada anggaran Belanja Modal.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Per 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2025	Realisasi Per 31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal dan Peralatan Mesin	0,00	4.656.075.000,00	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	0,00	249.977.405,00	(100,00)
Jumlah Belanja	0,00	249.977.405,00	0,00
Pengembalian	-	0,00	0,00
Jumlah Belanja	0,00	249.977.405,00	(100,00)

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp13.600,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp13.600,00 dan Rp15.376.161.352,00. Rincian saldo Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Perbandingan Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31-Des-25	31-Des-24
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	13.600,00	2.003.300,00
Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	0,00	15.374.158.052,00
Jumlah	13.600,00	15.376.161.352,00

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 adalah Utang Pajak Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kota Tarakan yang Belum Disetor berada pada kas tunai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang belum Disetor

Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Nilai
PPh23 Pemeliharaan Mesin Printer Epson L3210 2 Unit	3793A4F9BGJ29R79	09-Jan-26	9.600,00
PPh23 Pemeliharaan Mesin Printer Epson L3210 1 Unit	76F73015RHPT00RG	09-Jan-26	4.000,00
Total			13.600,00

Persediaan
Rp0,00

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.785.000,00.

Tabel 15
Perbandingan Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	0,00	4.785.000,00
Jumlah	0,00	4.785.000,00

Mutasi nilai Persediaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 16
Mutasi Nilai Persediaan

Saldo per 31 Desember 2024	4.785.000,00
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.945.500,00
Mutasi Kurang:	
Habis Pakai	(6.730.500,00)
Saldo per 31 Desember 2025	0,00

Mutasi tambah merupakan pembelian persediaan senilai Rp1.945.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17

Mutasi Tambah Persediaan per 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
1010301001	Alat Tulis	5	90.000,00
1010301004	Penghapus/Korektor	1	10.000,00
1010301005	Buku Tulis	1	96.000,00
1010301006	Ordner Dan Map	27	428.000,00
1010301010	Alat Perekat	1	180.000,00
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	14	224.000,00
1010302001	Kertas HVS	3	200.000,00
1010302004	Amplop	5	15.000,00
1010306002	Lampu Listrik	3	69.000,00
1010306010	Batu Baterai	6	219.000,00
1010309001	Meterai	40	414.500,00
Jumlah			1.945.500,00

Mutasi kurang merupakan habis pakai persediaan senilai Rp6.730.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 18

Mutasi Kurang Persediaan per 31 Desember 2025

Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
1010301001	Alat Tulis	6	330.000,00
1010301003	Penjepit Kertas	3	56.000,00
1010301004	Penghapus/Korektor	1	10.000,00
1010301005	Buku Tulis	1	96.000,00
1010301006	Ordner Dan Map	54	2.095.000,00
1010301010	Alat Perekat	2	295.000,00
1010301999	Alat Tulis Kantor Lain	14	224.000,00
1010302001	Kertas HVS	23	1.420.000,00
1010302002	Berbagai Kertas	5	87.000,00
1010302004	Amplop	5	15.000,00
1010304004	Tinta/Toner Printer	8	1.120.000,00
1010306002	Lampu Listrik	3	69.000,00
1010306010	Batu Baterai	11	299.000,00
1010309001	Meterai	60	614.500,00
Jumlah			6.730.500,00

C.3. Tanah

Tanah
Rp243.973.332,00

Tanah yang dimiliki oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp243.973.332,00 dan Rp243.973.332,00. Tanah per 31 Desember 2025 sebesar Rp243.973.332,00 tersebut merupakan Tanah Milik Negara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara ke Bawaslu Republik Indonesia dan kemudian ditransfer ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang berlokasi di Jl. Trans Kaltim, Tanjung Selor seluas 4.006m²

Tabel 19
Perbandingan Tanah
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tanah	243.973.332,00	243.973.332,00
Jumlah	243.973.332,00	243.973.332,00

Mutasi nilai Tanah dapat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 20
Mutasi Nilai Tanah

Saldo per 31 Desember 2024	243.973.332,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi Kurang:	0,00
Saldo per 31 Desember 2025	243.973.332,00

Peralatan dan Mesin
Rp11.092.574.304,00

C.4. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11.092.574.304,00 dan Rp12.535.846.104,00. Adapun saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 21
Perbandingan Saldo Peralatan dan Mesin
Per 31 Desember 2025

Keterangan	2025	2024
Peralatan dan Mesin	11.092.574.304,00	12.535.846.104,00
Jumlah	11.092.574.304,00	12.535.846.104,00

Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 sebesar Rp11.092.574.304,00 dirincikan sebagai berikut.

Tabel 22
Rincian Saldo Peralatan dan Mesin

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	3060102045	Tripod Camera	1	1.942.500,00
2	3050105017	Mesin Absensi	5	14.192.400,00
3	3060101098	Mixer Sound Sistem	1	2.941.500,00

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
4	3100102003	Note Book	2	68.154.000,00
5	3050204001	Lemari Es	1	5.000.000,00
6	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	159.346.992,00
7	3060102128	Camera Digital	12	197.830.800,00
8	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	13	139.252.800,00
9	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	9	27.900.000,00
10	3050204007	Exhaust Fan	1	1.567.500,00
11	3100102001	P.C Unit	48	389.200.842,00
12	3020101003	Station Wagon	13	6.569.316.000,00
13	3050201005	Sice	30	251.005.000,00
14	3100102002	Lap Top	70	1.167.481.028,00
15	3060101036	Microphone/Wireless MIC	1	2.109.000,00
16	3060101091	Digital LED Running Text	1	14.000.000,00
17	3050104001	Lemari Besi/Metal	16	67.607.300,00
18	3050206002	Televisi	6	42.319.159,00
19	3010304002	Portable Generating Set	5	261.600.000,00
20	3050105007	CCTV - Camera Control Television System	5	109.680.000,00
21	3050201002	Meja Kerja Kayu	100	145.534.450,00
22	3100204015	Firewall	1	34.500.000,00
23	3050201008	Meja Rapat	5	40.240.000,00
24	3060102165	Camera Conference	5	21.958.000,00
25	3020104001	Sepeda Motor	6	154.810.000,00
26	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	308.357.000,00
27	3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	3.960.000,00
28	3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	1	57.156.000,00
29	3050206046	Handy Cam	2	32.436.315,00
30	3100102009	Tablet PC	1	15.344.000,00
31	3050201003	Kursi Besi/Metal	131	149.184.000,00
32	3050204004	A.C. Split	38	271.561.980,00
33	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	4	13.776.000,00
34	3050104002	Lemari Kayu	29	60.160.000,00
35	3050206036	Dispenser	2	4.042.385,00
36	3060102118	Head Set	2	8.795.000,00
37	3050206008	Sound System	5	69.500.000,00
38	3060102061	Lensa Kamera	3	44.648.000,00
39	3050104007	Brandkas	7	54.375.000,00
40	3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	13	4.355.000,00
41	3050104005	Filing Cabinet Besi	9	22.500.000,00
42	3050105048	LCD Projector/Infocus	12	79.715.353,00
43	3060102012	Video Monitor	1	3.219.000,00
JUMLAH				11.092.574.304,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23
Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo per 31 Desember 2024	12.553.856.104,00
Mutasi kurang :	
Transfer keluar	(474.049.800,00)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(1.972.000,00)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(985.260.000,00)
Total mutasi kurang	(1.461.281.800,00)
Saldo per 31 Desember 2025	11.092.574.304,00
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(6.881.395.573,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	4.211.178.731,00

Mutasi kurang sebesar Rp1.461.281.800,00 dijelaskan sebagai berikut.

1. Transfer keluar sebesar Rp474.049.800,00 ke satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24
Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	3010304002	Portable Generating Set	1	45.400.000,00
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	8.000.000,00
3	3050104002	Lemari Kayu	6	11.820.000,00
4	3050104007	Brandkas	1	11.100.000,00
5	3050105007	CCTV - Camera Control Te	1	9.920.000,00
6	3050105017	Mesin Absensi	1	2.943.100,00
7	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	13.450.000,00
8	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD	1	3.100.000,00
9	3050201002	Meja Kerja Kayu	10	6.000.000,00
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	25	10.950.000,00
11	3050201005	Sice	6	38.950.000,00
12	3050201008	Meja Rapat	1	6.450.000,00
13	3050204004	A.C. Split	5	38.750.000,00
14	3050206008	Sound System	1	9.000.000,00
15	3060102128	Camera Digital	2	15.570.200,00
16	3060102165	Camera Conference	1	3.827.000,00
17	3060201999	Alat Komunikasi Telephone	1	3.444.000,00
18	3100102001	P.C Unit	7	58.325.000,00
19	3100102002	Lap Top	9	128.864.500,00
20	3100203003	Printer (Peralatan Personal	9	28.247.800,00
21	3100203004	Scanner (Peralatan Person	2	19.938.200,00
JUMLAH				474.049.800,00

2. Koreksi pencatatan nilai berkurang Head Set sebesar Rp1.972.000,00 berdasarkan Surat Keterangan nomor 24/PL.09/KL/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 dikarenakan tindak lanjut pengelolaan BMN di Lingkungan Bawaslu terkait temuan BPK yang menyatakan perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang.
3. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp985.200.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 303/PL.08/K1/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan telah laku terjual sebagaimana dilaporkan dalam Salinan Risalah Lelang Nomor 109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025 dan Risalah Lelang Nomor 130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025. Rincian penghentian aset dari penggunaan adalah sebagai berikut.

Tabel 25
Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan

NO	KODE	URAIAN	MEREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN	NILAI
1	3020101003	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova V M/T 2.0 Vin 2, Kijang Innova	2015	RUSAK BERAT	295.590.000,00
2	3020101003	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova V M/T Lux Bensi, Kijang Innova Lux	2015	RUSAK BERAT	303.750.000,00
3	3020102003	Station Wagon	Toyota All New Hilux Double Cabin G M/T, Grand New Hilux 4x4 Diesel	2015	RUSAK BERAT	385.920.000,00
TOTAL						985.260.000,00

Aset Tetap Lainnya
Rp249.977.405,00

C.5. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp249.977.405,00 dan Rp249.977.405,00.

Tabel 26
Perbandingan Saldo Aset Tetap Lainnya
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	249.977.405,00	249.977.405,00
Jumlah	249.977.405,00	249.977.405,00

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp249.977.405,00 merupakan renovasi gedung pinjam pakai yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Tana Tidung dan Bawaslu Kota Tarakan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 27
Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya

No	Uraian	Nilai
1	Pemeliharaan/Renovasi Gedung Kantor Bawaslu Kota Tarakan Tahun 2024	99.977.405,00
2	Pembuatan/Renovasi Ruang pertemuan dan parkir an Gedung Kantor Bawaslu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2024	150.000.000,00
Total		249.977.405,00

Saat ini Aset Tetap Renovasi sudah selesai dikerjakan dan sudah di koordinasikan penyerahannya oleh Satker Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara kepada Pemkot Tarakan dan Pemkab Tana Tidung.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp6.881.395.573,00

C.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp6.881.395.573,00 dan Rp7.013.183.495,00.

Tabel 28

Perbandingan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	6.881.395.573,00	7.013.183.495,00
Jumlah	6.881.395.573,00	7.013.183.495,00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025.

Tabel 29

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Desember 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	243.973.332,00	0,00	243.973.332,00
2	Peralatan dan Mesin	12.113.188.504,00	(6.881.395.573,00)	5.231.792.931,00
3	Aset Tetap lainnya	249.977.405,00	0,00	249.977.405,00
Jumlah		12.357.161.836,00	(6.881.395.573,00)	5.725.743.668,00

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp6.881.395.573,00 secara detail sebagai berikut.

Tabel 30

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Desember 2024

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 31 DESEMBER 2025 - AUDITED					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
131111	Tanah	4006	243.973.332,00	0,00	0,00	0,00	243.973.332,00
2010104999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	4006	243.973.332,00	0,00	0,00	0,00	243.973.332,00
132111	Peralatan dan Mesin	674	11.092.574.304,00	(7.013.183.495,00)	131.787.922,00	(6.881.395.573,00)	4.211.178.731,00
3010304002	Portable Generating Set	5	261.600.000,00	(38.142.856,00)	(30.885.714,00)	(69.028.570,00)	192.571.430,00
3020101003	Station Wagon	13	6.569.316.000,00	(3.904.276.287,00)	276.203.148,00	(3.628.073.139,00)	2.941.242.861,00
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	308.357.000,00	(22.025.500,00)	(44.051.000,00)	(66.076.500,00)	242.280.500,00
3020104001	Sepeda Motor	6	154.810.000,00	(81.000.714,00)	(13.030.001,00)	(94.030.715,00)	60.779.285,00
3050102007	Mesin Penghitung Uang	1	3.960.000,00	(3.960.000,00)	0,00	(3.960.000,00)	0,00
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	1	57.156.000,00	(57.156.000,00)	0,00	(57.156.000,00)	0,00
3050104001	Lemari Besi/Metal	16	67.607.300,00	(75.607.300,00)	8.000.000,00	(67.607.300,00)	0,00
3050104002	Lemari Kayu	29	60.160.000,00	(69.480.000,00)	10.820.000,00	(58.660.000,00)	1.500.000,00
3050104005	Filing Cabinet Besi	9	22.500.000,00	(22.500.000,00)	0,00	(22.500.000,00)	0,00
3050104007	Brandkas	7	54.375.000,00	(21.075.000,00)	(6.660.000,00)	(27.735.000,00)	26.640.000,00
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	5	109.680.000,00	(35.880.000,00)	(18.960.000,00)	(54.840.000,00)	54.840.000,00
3050105017	Mesin Absensi	5	14.192.400,00	(17.135.500,00)	2.943.100,00	(14.192.400,00)	0,00
3050105048	LCD Projector/Infocus	12	79.715.353,00	(61.665.353,00)	700.000,00	(60.965.353,00)	18.750.000,00
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	9	27.900.000,00	(3.100.000,00)	(5.270.000,00)	(8.370.000,00)	19.530.000,00
3050201002	Meja Kerja Kayu	100	145.534.450,00	(151.534.450,00)	6.000.000,00	(145.534.450,00)	0,00
3050201003	Kursi Besi/Metal	131	149.184.000,00	(125.124.000,00)	3.170.000,00	(121.954.000,00)	27.230.000,00
3050201005	Sice	30	251.005.000,00	(208.955.000,00)	20.950.000,00	(188.005.000,00)	63.000.000,00
3050201008	Meja Rapat	5	40.240.000,00	(46.690.000,00)	6.450.000,00	(40.240.000,00)	0,00
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	13	4.355.000,00	(4.355.000,00)	0,00	(4.355.000,00)	0,00
3050204001	Lemari Es	1	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00	(5.000.000,00)	0,00
3050204004	A.C. Split	38	271.561.980,00	(281.061.980,00)	32.250.000,00	(248.811.980,00)	22.750.000,00
3050204007	Exhaust Fan	1	1.567.500,00	(1.567.500,00)	0,00	(1.567.500,00)	0,00
3050206002	Televisi	6	42.319.159,00	(42.319.159,00)	0,00	(42.319.159,00)	0,00
3050206008	Sound System	5	69.500.000,00	(23.550.000,00)	(11.200.000,00)	(34.750.000,00)	34.750.000,00
3050206036	Dispenser	2	4.042.385,00	(4.042.385,00)	0,00	(4.042.385,00)	0,00

3050206046	Handy Cam	2	32.436.315,00	(32.436.315,00)	0,00	(32.436.315,00)	0,00
3060101036	Microphone/Wireless MIC	1	2.109.000,00	(1.265.400,00)	(421.800,00)	(1.687.200,00)	421.800,00
3060101091	Digital LED Running Text	1	14.000.000,00	(14.000.000,00)	0,00	(14.000.000,00)	0,00
3060101098	Mixer Sound Sistem	1	2.941.500,00	(1.764.900,00)	(588.300,00)	(2.353.200,00)	588.300,00
3060102012	Video Monitor	1	3.219.000,00	(1.931.400,00)	(643.800,00)	(2.575.200,00)	643.800,00
3060102045	Tripod Camera	1	1.942.500,00	(1.165.499,00)	(388.500,00)	(1.553.999,00)	388.501,00
3060102061	Lensa Kamera	3	44.648.000,00	(17.018.000,00)	(6.140.000,00)	(23.158.000,00)	21.490.000,00
3060102118	Head Set	2	8.795.000,00	(1.076.700,00)	(1.561.800,00)	(2.638.500,00)	6.156.500,00
3060102128	Camera Digital	12	197.830.800,00	(124.121.000,00)	(4.269.800,00)	(128.390.800,00)	69.440.000,00
3060102165	Camera Conference	5	21.958.000,00	(12.390.500,00)	(1.913.500,00)	(14.304.000,00)	7.654.000,00
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	4	13.776.000,00	(1.722.000,00)	(2.410.800,00)	(4.132.800,00)	9.643.200,00
3100102001	P.C Unit	48	389.200.842,00	(443.793.467,00)	54.592.625,00	(389.200.842,00)	0,00
3100102002	Lap Top	70	1.167.481.028,00	(790.472.533,00)	(99.035.187,00)	(889.507.720,00)	277.973.308,00
3100102003	Note Book	2	68.154.000,00	(8.519.250,00)	(17.038.500,00)	(25.557.750,00)	42.596.250,00
3100102009	Tablet PC	1	15.344.000,00	(1.918.000,00)	(3.836.000,00)	(5.754.000,00)	9.590.000,00
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	159.346.992,00	(107.062.922,00)	(18.837.374,00)	(125.900.296,00)	33.446.696,00
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	13	139.252.800,00	(132.384.125,00)	5.476.125,00	(126.908.000,00)	12.344.800,00
3100204015	Firewall	1	34.500.000,00	(12.937.500,00)	(8.625.000,00)	(21.562.500,00)	12.937.500,00
135111	Aset Tetap Renovasi	2	249.977.405,00	0,00	0,00	0,00	249.977.405,00
6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2	249.977.405,00	0,00	0,00	0,00	249.977.405,00
JUMLAH		4682	11.586.525.041,00	(7.013.183.495,00)	131.787.922,00	(6.881.395.573,00)	4.705.129.468,00

C.7. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp45.520.000,00 dan Rp45.520.000,00.

Aset Tak Berwujud
Rp45.520.000,00

Tabel 31

Perbandingan Aset Tak Berwujud
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Nama	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
1	Software Komputer	45.520.000,00	45.520.000,00
Total		45.520.000,00	45.520.000,00

Aset Tak Berwujud per 30 Desember 2025 sebesar Rp45.520.000,00 berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor terdiri atas:

1. Website Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan Alamat: <https://kaltara.bawaslu.go.id>. Senilai Rp14.300.000,00
2. Bank Data yaitu Sldatin (Sistem Data dan Informasi) Bawaslu Kaltara, Digitalisasi Dokumen Hasil Pengawasan dan Kesekretariatan senilai Rp31.220.000,00

C.8. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.520.000,00 dan Rp45.520.000,00.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp45.520.000,00

Tabel 32
Perbandingan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	45.520.000,00	45.520.000,00
Total		45.520.000,00	45.520.000,00

Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Lainnya per 30 Desember 2025.

Tabel 33
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	45.520.000,00	(45.520.000,00)	-
Jumlah	45.520.000,00	(45.520.000,00)	-

Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya per 30 Desember 2024 sebesar Rp45.520.000,00 secara detail sebagai berikut

Tabel 34
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Desember 2024

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 DESEMBER 2025					
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
162151	Software	2	45.520.000,00	(45.520.000,00)	0,00	(45.520.000,00)	0,00
8010101001	Software Komputer	2	45.520.000,00	(45.520.000,00)	0,00	(45.520.000,00)	0,00
JUMLAH		2	45.520.000,00	(45.520.000,00)	0,00	(45.520.000,00)	0,00

Utang kepada Pihak Ketiga
 Rp50.600.336,00

C.9. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp50.600.336,00 dan Rp91.884.205,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan

Tabel 35
Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Keterangan	31-Des-25	31-Des-24	Naik (Turun) %
Utang kepada Pihak Ketiga	50.600.336,00	91.884.205,00	-44,93
Jumlah	50.600.336,00	91.884.205,00	-44,93

Utang kepada Pihak Ketiga senilai Rp50.600.336,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 36
Rincian Utang Pihak Ketiga

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja barang yang masih harus dibayar	1.707.300
2	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	48.893.036
JUMLAH		50.600.336

Belanja barang yang masih harus dibayar senilai Rp1.707.300,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 37
Rincian Belanja Barang yang masih harus dibayar

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Belanja Langganan Air bulan Desember 2025	1.707.300,00
Total		1.707.300,00

Belanja pegawai yang masih harus dibayar senilai Rp48.893.036,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 38
Rincian Belanja Pegawai yang masih harus dibayar

No	Uraian	Nilai
1	Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Pokok PNS An. Astin, Dewi Irdayani, Feri Mulia Siagian yang masih harus dibayarkan di TA 2026	9.841.800,00
2	Belanja Pegawai Pembulatan Gaji PNS An. Astin, Dewi Irdayani, Feri Mulia Siagian yang masih harus dibayarkan di TA 2026	1.168,00
3	Belanja Pegawai Kekurangan Tunj. Suami/Istri PNS An. Astin, Dewi Irdayani, Feri Mulia Siagian yang masih harus dibayarkan di TA 2026	984.180,00
4	Belanja Pegawai Kekurangan Tunj. Anak PNS An. Astin, Dewi Irdayani, Feri Mulia Siagian yang masih harus dibayarkan di TA 2026	393.672,00
5	Belanja Pegawai Kekurangan Tunj. Fungsional An. Vicky Bagus Ramadhan bulan Agustus 2025 yang masih harus dibayarkan di TA 2026	493.030,00
6	Belanja Pegawai Tunj. PPh PNS An. Astin, Dewi Irdayani, Feri Mulia Siagian yang masih harus dibayarkan di TA 2026	932.799,00
7	Belanja Pegawai Uang Makan PNS Desember 2025 yang masih harus dibayarkan di TA 2026	14.015.000,00
8	Belanja Pegawai Kekurangan Gaji Pokok PPPK An. Edy Murdani, Ady Setiawan yang masih harus dibayarkan di TA 2026	604.800,00
9	Belanja Pegawai Pembulatan Gaji PPPK An. Edy Murdani, Ady Setiawan yang masih harus dibayarkan di TA 2026	11,00
10	Belanja Pegawai Tunjangan Suami/Istri PPPK An. Edy Murdani, Ady Setiawan yang masih harus dibayarkan di TA 2026	60.480,00
11	Belanja Pegawai Tunjangan Anak PPPK An. Edy Murdani, Ady Setiawan yang masih harus dibayarkan di TA 2026	12.096,00
12	Belanja Pegawai Uang Makan PPPK Desember 2025 yang masih harus dibayarkan di TA 2026	21.554.000,00
Total		48.893.036,00

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp13.600,00

C.10. Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp13.600,00 dan Rp2.003.300,00. Nilai tersebut merupakan Utang pajak Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kota Tarakan yang belum disetor.

Tabel 39

Rincian Utang Pajak Bendahara Pengeluaran

Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Nilai
PPh23 Pemeliharaan Mesin Printer Epson L3210 2 Unit	3793A4F9BGJ29R79	09-Jan-26	9.600,00
PPh23 Pemeliharaan Mesin Printer Epson L3210 1 Unit	76F73015RHPT00RG	09-Jan-26	4.000,00
Total			13.600,00

Ekuitas

Rp4.654.529.132,00

C.11. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.654.529.132,00 dan Rp21.322.706.568,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset sebesar Rp4.705.143.068,00 dan kewajiban Rp50.614.936,00 Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp9.562.427.615,00

Beban Pegawai untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.562.427.615,00 dan Rp7.790.046.790,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40

Perbandingan Saldo Beban Pegawai 31 Desember 2025 dan 2024

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	1.519.216.268,00	1.214.492.416,00	25,091
Beban Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	2.975.713.832,00	3.797.187.602,00	(21,634)
Beban Gaji dan Tunjangan PPPK	2.090.835.171,00	820.476.302,00	154,832
Beban Lembur	34.294.000,00	0,00	
Beban Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	2.942.368.344,00	1.957.890.470,00	50,283
Jumlah	9.562.427.615,00	7.790.046.790,00	22,752

Beban Pegawai Per 31 Desember 2025 mengalami Kenaikan sebesar 22,133 persen dari Tahun 2024. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pelantikan PPPK 38 orang dan kenaikan gaji berkala PNS.

Terdapat perbedaan jumlah Belanja Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Pegawai pada Laporan Operasional Desember 2025, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 41

Rincian Mutasi Beban Pegawai

Belanja Pegawai LRA	9.532.713.486,00
Mutasi Tambah	
Belanja Pegawai 2025 yang masih harus dibayar	48.893.036,00
Total Mutasi Tambah	48.893.036,00
Mutasi Kurang	
Jurnal balik belanja pegawai yang masih harus dibayar 2024	(19.178.907,00)
Total Mutasi Kurang	(19.178.907,00)
Total Beban Pegawai 31 Desember 2025	9.562.427.615,00

D.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp6.730.500,00

Beban Persediaan Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp6.730.500,00 dan Rp598.493.100,00

Tabel 42

Perbandingan Saldo Beban Persediaan
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Persediaan Konsumsi	6.730.500	598.493.100	(98,88)
Jumlah	6.730.500	598.493.100	(98,88)

Beban Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 98,88 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini dikarenakan identitas PTPS dalam rangka pemilihan umum tahun 2024 yang dicatat persediaan seluruhnya telah didistribusikan, sehingga di Tahun 2025 saldo persediaan hanya berasal dari Alat Tulis Kantor (ATK).

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang Persediaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban Persediaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 43

Rincian Mutasi Saldo Beban Persediaan

Mutasi Tambah	
Saldo Barang Konsumsi 1 Jan 2024	4.785.000,00
Pembelian	1.945.000,00
Total Mutasi Tambah	6.730.000,00
Mutasi Kurang	
Saldo barang konsumsi per 31 Desember 2024	
Total Mutasi Kurang	000,00
Total Beban Persediaan 30 September 2024	6.730.000,00

Beban Barang dan
Jasa
Rp7.951.005.252,00

D.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.951.005.252,00 dan Rp58.356.503.825,00.

Tabel 44

*Perbandingan Saldo Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2025 dan 2024*

URAIAN	31-Des-25	31-Des-24	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	3.509.840.548,00	16.752.508.346,00	(79,05)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat		223.000,00	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	154.098.800,00	317.872.000,00	(51,52)
Beban Barang Operasional Lainnya	449.559.600,00	469.650.000,00	(4,28)
Beban Bahan	733.149.936,00	7.517.811.171,00	(90,25)
Beban Honor Output Kegiatan	225.000.000,00	10.808.202.000,00	(97,92)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	53.000.000,00	1.532.629.411,00	(96,54)
Beban Langganan Listrik	155.979.324,00	386.862.300,00	(59,68)
Beban Langganan Air	23.326.144,00	88.562.878,00	(73,66)
Beban Jasa Konsultan		32.800.000,00	(100,00)
Beban Sewa	1.869.450.000,00	12.211.933.920,00	(84,69)
Beban Jasa Profesi	151.700.900,00	1.153.490.000,00	(86,85)
Beban Jasa Lainnya	625.900.000,00	7.083.958.799,00	(91,16)
Jumlah	7.951.005.252,00	58.356.503.825,00	(86,38)

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 86,38 persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan karena masa tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah selesai.

Terdapat perbedaan jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah Beban

Barang dan Jasa pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut:

Tabel 45

Rincian Mutasi Saldo Beban Barang dan Jasa

Mutasi Tambah	
Belanja operasional LRA	4.120.720.401,00
Belanja non operasional LRA	1.011.149.936,00
Belanja jasa LRA	2.831.632.713,00
Belanja barang yang masih harus dibayar	1.707.300,00
Total Mutasi Tambah	7.965.210.350,00
Mutasi Kurang	
Jurnal balik belanja barang yang masih harus dibayar 2024	(14.206.098,00)
Total Mutasi Kurang	(14.206.098,00)
Total Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2025	7.951.004.252,00

D.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp1.328.681.754,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.328.681.754,00 dan Rp1.692.315.701,00.

Tabel 46

*Perbandingan Saldo Beban Pemeliharaan
Per 31 Desember 2025 dan 2024*

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	904.244.750	803.025.375	0,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	424.437.004	889.290.326	(52,27)%
Jumlah	1.328.681.754	1.692.315.701	(52,27)%

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 52,27 persen dibandingkan dengan 2024 dikarenakan kebutuhan untuk perawatan kendaraan dinas yang mobilitasnya lebih rendah dari 31 Desember 2024 karena sudah tidak berlangsungnya masa tahapan Pemilu Tahun 2024

Tidak terdapat perbedaan jumlah beban pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah belanja pemeliharaan pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025..

Beban Perjalanan Dinas
Rp10.129.590.903,00

D.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp10.129.590.903 dan 57.682.332.005,00.

Tabel 47
Perbandingan Saldo Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Biasa	5.346.706.093	18.028.476.330	(70,34)%
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	182.987.911	14.251.388.203	(98,72)%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.702.989.968	17.435.009.877	(90,23)%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2.897.266.931	7.967.457.595	(63,64)%
Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	- 360.000		
Jumlah	10.129.590.903	57.682.332.005	(322,93)%

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 230,55 persen dari 31 Desember 2024, penurunan tersebut disebabkan masa tahapan Pemilu Tahun 2024 sudah selesai.

Terdapat perbedaan jumlah belanja perjalanan dinas pada Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan jumlah beban perjalanan dinas pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025, hasil mutasi beban yang diperoleh sebagai berikut.

Tabel 48
Rincian Mutasi Saldo Beban Perjalanan Dinas

Mutasi Tambah	
Belanja Perjalanan Dinas LRA	10.188.091.103,00
Total Mutasi Tambah	10.188.091.103,00
Mutasi Kurang	
Jurnal balik atas belanja yang masih harus dibayar 2024	(58.500.200,00)
Total Mutasi Kurang	(58.500.200,00)
Total Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024	10.129.590.903,00

D.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.199.676.156,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.199.676.156 dan Rp1.052.943.642,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 49
Perbandingan Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.199.676.156,00	1.046.956.767,00	15%
Beban Amortisasi Software		3.902.500,00	306,41
Jumlah	1.199.676.156,00	1.050.859.267,00	14%

Terdapat selisih antara kenaikan/penurunan akumulasi penyusutan/amortisasi dan beban penyusutan/amortisasi per 31 Desember 2025 yang dirincikan sebagai berikut.

Tabel 50
Rincian Mutasi Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2024	(7.013.183.495,00)
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2025	(6.881.395.573,00)
Kenaikan/penurunan akumulasi	(131.787.922,00)
Beban Penyusutan/Amortisasi LO	
Beban Penyusutan/Amortisasi LO	1.199.676.156,00
Total Beban Penyusutan/Amortisasi LO	1.199.676.156,00
Selisih Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2024	(1.331.464.078,00)

Selisih antara Kenaikan/Penurunan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi dan Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2024 sebesar minus Rp1.331.464.078,00 terdiri dari

1. Transfer keluar peralatan dan mesin ke satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau sebesar Rp346.006.878,00
2. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp985.260.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 303/PL.08/K1/12/2025 tanggal 29 Desember 2025 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah Dan/Atau Bangunan Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan telah laku terjual sebagaimana dilaporkan dalam Salinan Risalah Lelang Nomor 109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025 dan Risalah Lelang Nomor 130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025. Rincian penghentian aset dari penggunaan adalah sebagai berikut.

Tabel 51
Rincian Penghentian Aset dari Penggunaan

NO	KODE	URAIAN	MEREK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN	NILAI
1	3020101003	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova V M/T 2.0 Vin 2, Kijang Innova	2015	RUSAK BERAT	295.590.000,00
2	3020101003	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova V M/T Lux Bensi, Kijang Innova Lux	2015	RUSAK BERAT	303.750.000,00
3	3020102003	Station Wagon	Toyota All New Hilux Double Cabin G M/T, Grand New Hilux 4x4 Diesel	2015	RUSAK BERAT	385.920.000,00
TOTAL						985.260.000,00

3. Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang sebesar Rp197.200,00 berupa Head Set berdasarkan Surat Keterangan nomor 24/PL.09/KL/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 dikarenakan tindak lanjut pengelolaan BMN di Lingkungan Bawaslu terkait temuan BPK yang menyatakan perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang.

Surplus/Defisit
Pelepasan Aset
Rp246.010.000,00

D.7. Kegiatan Non Operasional

D.7.1 Surplus/Defisit Pelepasan Aset

Surplus Pelepasan Aset Non Lancar untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp246.010.000,00 dan Rp16.569.821,00.

Tabel 52
Perbandingan Saldo Surplus/Defisit Pelepasan
Per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan Pelepasan Aset	246.010.000	16.569.821	-
Beban Pelepasan Aset	000,00	(4.500.000,00)	(100,00)%
Jumlah	246.010.000,00	12.069.821,00	19,38

Pendapatan pelepasan aset non lancar sebesar Rp246.010.000,00 merupakan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dari Lelang Wajib Non Eksekusi BMN sebesar Rp246.010.000 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 53
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

No	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Keterangan	Nomor Risalah Lelang	NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Toyota New Kijang Innova V M/T 2.0 Vin 2, Kijang Innova	2015	Rusak Berat	RL-109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025	A2B7E2G503H8TEI4	26 November 2025	100.979.000
2	Toyota New Kijang Innova V M/T Lux Bens, Kijang Innova Lux	2015	Rusak Berat	RL-109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025	A2B7E2G503H8TEI4	26 November 2025	84.079.000
3	Toyota All New Hilux Double Cabin G M/T, Grand New Hilux 4x4 Diesel	2015	Rusak Berat	RL-130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025	9E0CA2G503JTK3JS	16 Desember 2025	60.952.000
JUMLAH							246.010.000

D.7.2 Surplus/Defisit dari Kegiatan non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan non Operasional Lainnya untuk Periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp76.800.000,00 dan Rp18.535.000,00.

Tabel 54
Perbandingan Saldo Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
Lainnya 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76.800.000	18.535.000	314,35
Jumlah	76.800.000,00	18.535.000,00	314,35

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp76.800.000,00

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan non Operasional Lainnya Per 30 Desember 2025 sebesar Rp76.800.000,00 merupakan penerimaan kembali belanja barang TAYL berupa kelebihan pembayaran atas belanja Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55

*Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan non Operasional Lainnya
Per 30 Desember 2025*

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian Pokja dukungan administrasi hibah pemilihan Bulungan	E74322G502PF9M9H	27 Maret 2025	46.800.000
2	Pengembalian belanja tarakan (media tvri)	813A33CIFTBL4K8M	21 Maret 2025	30.000.000
JUMLAH				76.800.000

*Pos Luar Biasa
Rp0,00*

D.8. Pos Luar Biasa

Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Defisit LO
Rp29.855.302.180,00*

D.9. Surplus/Defisit LO

Defisit LO Per 31 Desember 2025 dan 2024 masing –masing sebesar Rp29.855.302.180,00 dan Rp127.145.445.867,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp21.321.682.193,00

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.321.682.193,00 dan 27.627.911.703,00.

E.2. Surplus/Defisit LO

Defisit LO

Rp29.855.302.180,00

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar Rp29.855.302.180,00 dan Rp127.145.445.867,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(3.750.693.006,00) dan Rp8.010.000,00

E.3.1. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset

Non Revaluasi

Rp1.774.800,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar minus Rp1.774.800,00 dan Rp8.010.000,00. Koreksi nilai aset non revaluasi sebesar minus Rp1.774.800,00 merupakan koreksi pencatatan nilai berkurang Head Set berdasarkan Surat Keterangan nomor 24/PL.09/KL/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 dikarenakan tindak lanjut pengelolaan BMN di Lingkungan Bawaslu terkait temuan BPK yang menyatakan perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang. Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah sebagai berikut.

Tabel 56

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Uraian	Nilai
Koreksi pencatatan nilai berkurang Head Set	1.972.000,00
Akumulasi penyusutan	(197.200,00)
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025	1.774.800,00

Lain-lain

Rp3.748.918.206,00

E.3.2. Lain-lain

Nilai Lain-Lain pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.748.918.206,00 dan Rp0,00. Nilai tersebut merupakan Pengembalian Sisa Kas Hibah Langsung ke Pemerintah Daerah atas Hibah yang di terima Tahun Anggaran yang Lalu sesuai dengan rincian berikut.

Tabel 57
Rincian Saldo Lain-lain per 31 Desember 2025

No	Uraian	No Register	No SP4HL	Tgl SP4HL	Nilai
1	Bawaslu Provinsi Kaltara	2MN38SUA	00418A	04-Sep-25	2.929.262.746,00
2	Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	2AP1HHA	00423A	08-Sep-25	32.970.555,00
3	Bawaslu Kabupaten Nunukan	26XCPFPA	00424A	08-Sep-25	143.489.884,00
4	Bawaslu Kota Tarakan	2A15DJTA	00426A	08-Sep-25	57.620.267,00
5	Bawaslu Kabupaten Bulungan	29CCWARA	00427A	08-Sep-25	585.574.754,00
Jumlah					3.748.918.206,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp16.938.842.125,00

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.938.842.125,00 dan Rp120.840.240.732,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 58
Perbandingan Saldo Transaksi Antar Entitas 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	18.592.119.789,00	77.170.640.756,00
Diterima dari Entitas Lain	(322.810.000,00)	(529.451,00)
Transfer Keluar	(1.330.467.664,00)	278.473.332,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00	25.470.581.000,00
Jumlah	16.938.842.125,00	102.919.165.637,00

E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas
Lain
Rp18.592.119.789,00

Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada 31 Desember 2025 DKEL sebesar Rp18.592.119.789,00

Tabel 59
Rincian Saldo Ditagihkan ke Entitas Lain

No	Akun	Uraian	Realisasi (Rp)
1	51	Belanja Pegawai	9.533.083.586,00
2	52	Belanja Barang	19482581407
Jumlah			29.015.664.993,00
Pengembalian Belanja Pegawai			(370.100,00)
Pengembalian Belanja Barang			(360.000,00)
SP2HL Belanja 2025			(10.422.815.104,00)
Saldo DKEL 31 Desember 2025			18.592.119.789,00

Diterima dari Entitas
Lain
Rp322.810.000,00

E.4.2. Diterima dari Entitas Lain

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025, DDEL sebesar Rp322.810.000,00 yang terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin dan Penerimaan Kembali Belanja

Barang Tahun Anggaran yang Lalu sebesar Rp246.010.000,00 dan Rp76.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin adalah Lelang Wajib Non Eksekusi BMN sebesar Rp246.010.000 berupa 3 unit Station Wagon dikarenakan kondisi rusak berat pada satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 60

Rincian Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

No	Merk/Tipe	Tahun Perolehan	Keterangan	Nomor Risalah Lelang	NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Toyota New Kijang Innova V M/T 2.0 Vin 2, Kijang Innova	2015	Rusak Berat	RL-109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025	A2B7E2G503H8TEI4	26 November 2025	100.979.000
2	Toyota New Kijang Innova V M/T Lux Bens, Kijang Innova Lux	2015	Rusak Berat	RL-109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025	A2B7E2G503H8TEI4	26 November 2025	84.079.000
3	Toyota All New Hilux Double Cabin G M/T, Grand New Hilux 4x4 Diesel	2015	Rusak Berat	RL-130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025	9E0CA2G503JTK3JS	16 Desember 2025	60.952.000
JUMLAH							246.010.000

- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu senilai Rp76.800.000,00

Tabel 61

Rincian Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu

No	Uraian	NTPN	Tanggal Setor	Nilai
1	Pengembalian Pokja dukungan administrasi hibah pemilihan Bulungan	E74322G502PF9M9H	27 Maret 2025	46.800.000
2	Pengembalian belanja tarakan (media tvri)	813A33CIFTBL4K8M	21 Maret 2025	30.000.000
JUMLAH				76.800.000

Transfer Keluar
Rp1.330.467.664,00

E.4.3. Transfer Keluar

Pada periode 31 Desember 2025, Transfer Keluar sebesar Rp1.330.467.664 yang terdiri dari :

- a. Transfer keluar peralatan dan mesin ke satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau sebesar Rp128.042.922,00 berdasarkan Berita Acara Transfer Barang Milik Negara nomor 42/PL.09/KL/06/2025 tanggal 17 Desember 2025 dan nomor 75/PL.09/KL/12/2025 tanggal 31 Desember 2025.

Tabel 62
Rincian Transfer Keluar Peralatan dan Mesin

No	Kode	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	3010304002	Portable Generating Set	1	45.400.000,00
2	3050104001	Lemari Besi/Metal	2	8.000.000,00
3	3050104002	Lemari Kayu	6	11.820.000,00
4	3050104007	Brandkas	1	11.100.000,00
5	3050105007	CCTV - Camera Control Te	1	9.920.000,00
6	3050105017	Mesin Absensi	1	2.943.100,00
7	3050105048	LCD Projector/Infocus	2	13.450.000,00
8	3050105058	Focusing Screen/Layar LCD	1	3.100.000,00
9	3050201002	Meja Kerja Kayu	10	6.000.000,00
10	3050201003	Kursi Besi/Metal	25	10.950.000,00
11	3050201005	Sice	6	38.950.000,00
12	3050201008	Meja Rapat	1	6.450.000,00
13	3050204004	A.C. Split	5	38.750.000,00
14	3050206008	Sound System	1	9.000.000,00
15	3060102128	Camera Digital	2	15.570.200,00
16	3060102165	Camera Conference	1	3.827.000,00
17	3060201999	Alat Komunikasi Telephone	1	3.444.000,00
18	3100102001	P.C Unit	7	58.325.000,00
19	3100102002	Lap Top	9	128.864.500,00
20	3100203003	Printer (Peralatan Personal	9	28.247.800,00
21	3100203004	Scanner (Peralatan Person	2	19.938.200,00
Jumlah				474.049.800,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin				(346.006.878,00)
Nilai Transfer Keluar Peralatan dan Mesin				128.042.922,00

- b. Migrasi saldo hibah ke satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau sebesar Rp1.202.424.742,00

E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Penurunan Ekuitas
Rp16.617.255.725,00

Penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar minus Rp16.617.255.725,00 dan minus Rp6.306.229.510,00

Tabel 63
Perbandingan Saldo Kenaikan/Penurunan Ekuitas
per 31 Desember 2025 dan 2024

Kenaikan/Penurunan Ekuitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Surplus/(Defisit) LO	(29.805.404.844,00)	(127.154.480.242,00)
Koreksi yang Menambah/mengurangi Ekuitas	(3.750.693.006,00)	8.010.000,00
Transaksi antar Entitas	16.938.842.125,00	120.840.240.732,00
Jumlah	(16.617.255.725,00)	(6.306.229.510,00)

Ekuitas Akhir
Rp4.704.426.468,00

E.6. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.704.426.468,00 dan Rp21.321.682.193,00. Nilai ekuitas akhir merupakan akumulasi nilai ekuitas awal sebesar Rp21.321.682.193,00 ditambah penurunan ekuitas sebesar Rp16.617.255.725,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Pengungkapan Lainnya

1. Rekening Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga menjelaskan bahwa Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebanyak 17 (tujuh belas) yang terdiri dari:

- a. Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sejumlah 6 (enam) rekening yang terdiri dari 1 (satu) rekening BP Satker dan 5 (lima) rekening BPP Bawaslu Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 64
Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

No	Nama Rekening	Nomor Rekening	Bank
1	BPG 185 BAWASLU KALTARA 01 417793	652294177931000	BRI
2	BPP 185 BAWASLU KALTARA PANWAS BLG	652294177931001	BRI
3	BPP 185 BAWASLU KALTARA PANWAS KTT	652294177931002	BRI
4	BPP 185 BAWASLU KALTARA PANWAS TRK	652294177931003	BRI
5	BPP 185 BAWASLU KALTARA PANWAS MLN	652294177931004	BRI
6	BPP 185 BAWASLU KALTARA PANWAS NNK	652294177931005	BRI

2. Pejabat Perbendaharaan dan Pengelola Keuangan

Sepanjang tahun 2025, telah terdapat beberapa pergantian pejabat perbendaharaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65
Rincian Pergantian Pejabat Perbendaharaan

No	Jabatan	Semula	Menjadi	Nomor SK	Tanggal SK
1	PPK Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	-	Denny Irawan, S.E.	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
2	BP Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	-	Retno Ambarsari, S.Si	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
3	PPSPM Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	-	Tri Mardiono, S.E., M.M.	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
4	PPK Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan	-	Dewi Irdayani, S.P	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
5	PPK Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	-	Zulkipli, S.Pdi	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
6	PPK Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan	-	Kristarmaji Balawa, S.Pd	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
7	PPK Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	-	Rahmat Nur, S.E., M.H.	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
8	BPP Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	-	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
9	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	-	Lucky Susilo, M.Pd.	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
10	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nunukan	-	Hendrawan Situmorang, S.Sos	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025

11	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bulungan	-	Andi Muhammad Arfah, S.KM	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
12	BPP Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	-	Zaenal Abidin	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
13	PPABP Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	-	Ariyatna Rosa Maghdalena, A.Md.Ak	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
14	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	-	Agus Setiawan, S.E.	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
15	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	-	Dwi Fitriyani, S.E.	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
16	Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	-	Rizaldi, S.E.	2/KU.01.00/KL/01/2025	03 Januari 2025
17	BP Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Retno Ambarsari, S.Si	Fadhila Suha Maharani, A.Md.Ak	9/KU.01.00/KL/05/2025	29 April 2025
18	PPSPM Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	Tri Mardiono, S.E., M.M.	Retno Ambarsari, S.Si	9/KU.01.00/KL/05/2025	29 April 2025

F.2. Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terdapat pada fungsi Pelayanan Umum Lembaga Eksekutif Dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, Serta Urusan Luar Negeri dengan rincian sebagaimana terlampir.

F.3. Penjelasan Anggaran Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 8 Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dari 8 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

- Prioritas Nasional 8 - Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Pelaksanaannya difokuskan pada sektor Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif PN 8 memiliki 1 kegiatan prioritas dengan pagu mencapai Rp14.300.000,00 dan realisasi sebesar Rp11.300.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 66
Realisasi dan Capaian Output Program Prioritas Nasional

Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
7013.QDB.002	14.300.000,00	11.300.000,00	79,02%	Lembaga	1	1	100%
JUMLAH	14.300.000,00	11.300.000,00	79,02%		1	1	100%

F.4. Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Kegiatan penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP Dan Inspektorat Utama Pada Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara.

Monitoring tindak lanjut sudah dilakukan. Rincian monitoring tindak lanjut terlampir pada Lampiran.

F.5. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Dalam rangka mengimplementasikan pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Tahun 2025 terhadap Pengendalian Intern Tingkat Entitas, Pengendalian Umum Teknologi Informasi Dan Komunikasi, dan Pengendalian Intern Tingkat Proses/Transaksi.

Akun signifikan yang menjadi dasar penilaian adalah sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 573/KU.02/SJ/12/2024 tentang Penetapan Perubahan Akun Signifikan Dalam Rangka Penilaian Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adapun akun signifikan tersebut meliputi 1) Akun Kas Lainnya di K/L dari Hibah; 2) Akun Kas Lainnya di BP; 3) Akun Beban Perjalanan Dinas Biasa; dan 4) Akun Peralatan dan Mesin. Berdasarkan penilaian tersebut, tim penilai menyimpulkan bahwa pengendalian intern atas pelaporan keuangan tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan kuasa pengguna anggaran adalah efektif.

LAMPIRAN

KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
AUDITED TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (417793) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kode dan Nama UAPPW : (115013500KD) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Kode dan Nama Eselon 1 : SEKRETARIAT BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
Kode dan Nama K/L : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya	
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A				
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	V		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	V		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	V		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	V		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	V		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	V		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	V		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	V		Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	V		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	V		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	V		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		V	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	V		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		V	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		V	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		V	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Reklas Internal Belum Transfer masuk (tnr) Internal Aset per tanggal pelaporan		V	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		V	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Setor Hilang per tanggal pelaporan dan Belum melakukan Penyesuaian Diutang		V	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		V	Tidak
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		V	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		V	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		V	Tidak
	a. Pagu/DIPA		V	Tidak
	b. Estimasi PNBp		V	Tidak
	c. Belanja		V	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	e. Pendapatan		V	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		V	Tidak
	g. Kas BLU		V	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		V	Tidak
	i. Kas Hibah		V	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		V	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		V	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)	V		Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregsiter)		V	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		V	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		V	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		V	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		V	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya

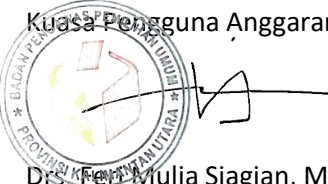
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruai		V	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		V	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		V	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	V		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	V		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	V		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	V		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	V		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		V	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		V	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/401/ Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		V	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		V	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		V	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		V	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		V	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		V	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		V	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		V	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		V	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		V	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		V	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		V	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		V	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		V	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		V	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		V	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		V	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	V		Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.	V		Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		V	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		V	Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	0		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		V	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		V	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akruai?			Ya

	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		V	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		V	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	V		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	V		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	V		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	V		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito			Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		V	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	V		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		V	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		V	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		V	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	V		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		V	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	V		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	V		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		V	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		V	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	V		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	V		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		V	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		V	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		V	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		V	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		V	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		V	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)			Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		V	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		V	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		V	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		V	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		V	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	V		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	V		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	V		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	V		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?		V	Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?		V	Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		V	Ya/Tidak

[illegible]

MONITORING POSISI KAS (RUPIAH MURNI)
PER DESEMBER 2025

No	BP/BPP	Saldo Rek Koran Bank (RM) xxxxxxx	Uang Tunai di Brankas xxxxxxx	Uang di BPP xxxxxxx	Jumlah Kas di BP/BPP	Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di Neraca			Jumlah	Selisih	Keterangan Selisih	Tanggal Setor	No Bukti Setor (Jika Ada)
							Sisa LS yang belum disetor/distribusi	Jasa Giro Yang Belum Disetor	Pajak Yang Belum Disetor					
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(6-11)	13	14	15
1	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	-		
2	BPP Bawaslu Kota Tarakan	0,00	13.600,00										9 jan	3793A4F9BGJ29R79 76F73015RHPT00RG
3	BPP Bawaslu Kabupaten Nunukan	0,00	0,00											
4	BPP Bawaslu Kabupaten Tana Tidung	0,00	0,00											
5	BPP Bawaslu Kabupaten Bulungan	0,00	0,00											
	Jumlah	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00			

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Feri Mulia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

MONITORING POSISI KAS (HIBAH)
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 417793
NAMA SATKER : Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

No	BP/BPP	Saldo Rek Koran Bank (RM) xxxxxxx	Uang Tunai di Brankas xxxxxxx	Uang di BPP xxxxxxx	Jumlah Kas di BP/BPP	Kas di Bendahara Pengeluaran di Neraca	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran di Neraca			Jumlah	Selisih	Keterangan Selisih
							Sisa LS yang belum disetor/distribusi	Jasa Giro Yang Belum Disetor	Pajak Yang Belum Disetor			
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9	10	11=(7+8+9+10)	12=(6-11)	13
1	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	NIHIL										
2	BPP Bawaslu Kota Tarakan											
3	BPP Bawaslu Kabupaten Nunukan											
4	BPP Bawaslu Kabupaten Tana Tidung											
5	BPP Bawaslu Kabupaten Bulungan											
	Jumlah											

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

REKAP BELANJA SEWA DIBAYAR DI MUKA
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 417793
NAMA SATKER : Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	NAMA SEWA	NOMOR KONTRAK	TANGGAL KONTRAK	JANGKA WAKTU SEWA	PERIODE		TANGGAL BAYAR	JUMLAH NILAI SEWA (Rp)	PERHITUNGAN BEBAN SEWA PER		SEWA DIBAYAR DIMUKA PER 30 Juni 2023	KET
						MULAI	BERAKHIR			JANGKA WAKTU DILALUI (BULAN)	NILAI		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L = (K/F)*J	M=J-L	
1	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	NIHIL											
2	BPP Bawaslu Kota Tarakan												
3	BPP Bawaslu Kabupaten Nunukan												
4	BPP Bawaslu Kabupaten Tana Tidung												
5	BPP Bawaslu Kabupaten Bulungan												
JUMLAH													

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Ferial Muliya Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

REKAPITULASI HIBAH BARANG BAWASLU
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 417793
NAMA SATKER : Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

No	Penerima Hibah (Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nomor Register	Pendonor	No. NPHD	Tgl. NPHD	Nilai NPHD	No. BAST	Tgl. BAST	Nilai BAST	No. MPHLBJS	Tgl. MPHLBJS	No. Persetujuan MPHLBJS	Tgl. Persetujuan MPHLBJS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15
1	BP Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara	NIHIL											
2	BPP Bawaslu Kota Tarakan												
3	BPP Bawaslu Kabupaten Nunukan												
4	BPP Bawaslu Kabupaten Tana Tidung												
5	BPP Bawaslu Kabupaten Bulungan												
JUMLAH													

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kuasa Pengguna Anggaran,

Drs. Feri Mula Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

DAFTAR UTANG PIHAK KETIGA/TUNGGAKAN
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 417793
NAMA SATKER : Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

No	Penerima	Kode Akun	Untuk Pembayaran	Alasan Keterlambatan	Kontrak / Tagihan (jika ada)		Sumber Dana (Hibah/RM)	Jumlah
					Nomor	Tgl		
NO	Penerima	Kode Akun	Untuk Pembayaran	Alasan Keterlambatan	Nomor	tgl	Sumber Dana (Hibah/RM)	Jumlah
1	Feri Mulia Siagian	511111	KGB OKT S.D. DES 2025	SK Terbit ketika gaji induk Bulan Desember sudah diajukan, sehingga kekurangan gaji kenaikan gaji berkala baru bisa diajukan tahun 2026			RM	505.200
2	Feri Mulia Siagian	511121					RM	50.520
3	Feri Mulia Siagian	511122					RM	20.208
4	Feri Mulia Siagian	511125					RM	5.759
5	Dewi Irdayani	511111	KGB APR 2024 S.D. DES 2025	SK Terbit ketika gaji induk Bulan Desember 2025 sudah diajukan, sehingga kekurangan gaji kenaikan gaji berkala tahun 2024 baru bisa diajukan tahun 2026			RM	7.780.500
6	Dewi Irdayani	511119					RM	882
7	Dewi Irdayani	511121					RM	778.050
8	Dewi Irdayani	511122					RM	311.220
9	Dewi Irdayani	511125					RM	853.287
10	Edy Murdani, Ady Setiawan	511611	KGB AGUSTUS S.D. DES 2025	SK Terbit ketika gaji induk Bulan Desember sudah diajukan, sehingga kekurangan gaji kenaikan gaji berkala baru bisa diajukan tahun 2026			RM	604.800
11	Edy Murdani, Ady Setiawan	511619					RM	11
12	Edy Murdani, Ady Setiawan	511621					RM	60.480
13	Edy Murdani, Ady Setiawan	511622					RM	12.096
14	Astin	511111	KGB DES 2024 S.D. DES 2025	SK KGB terlewat diberikan kepada PPABP ketika yang bersangkutan mutasi dari Pemda.			RM	1.556.100
15	Astin	511119					RM	286
16	Astin	511121					RM	155.610
17	Astin	511122					RM	62.244
18	Astin	511125					RM	73.753
19	Vicky Bagus Ramadhan	511124	Tunjangan Fungsional bln Agustus 2025	SK sempat tidak terbaca di aplikasi Web Gaji hingga di bulan Desember anggaran sudah tidak tersedia			RM	493.030
20	Seluruh PNS	511129	Uang Makan 13 s.d. 31 Desember 2025	KPPN tidak memperkenankan pengajuan Uang Makan periode awal Desember menggunakan mekanisme LS, sehingga anggaran hanya mencukupi untuk membayarkan periode 1 s.d. 12 Desember 2025 melalui mekanisme UP			RM	14.015.000

21	Seluruh PPPK	511628	Uang Makan 13 s.d. 31 Desember 2025	KPPN tidak memperkenankan pengajuan Uang Makan periode awal Desember menggunakan mekanisme LS, sehingga anggaran hanya mencukupi untuk membayar periode 1 s.d. 12 Desember 2025 melalui mekanisme UP			RM	21.554.000
22	Tagihan PDAM Bulan Desember 2025	522113	Tagihan PDAM Bulan Desember 2025	Tagihan muncul pada Januari 2026			RM	1.707.300
JUMLAH								50.600.336

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kuasa Pengguna Anggaran,



Drs. Feri Mulia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

DAFTAR PEROLEHAN LAINNYA
PER DESEMBER 2025

KODE SATKER : 417793
NAMA SATKER : Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

No	Penerima	Nama Barang	Sumber Perolehan	Tanggal Penerimaan	Jumlah
1	NIHIL				
2					
JUMLAH					

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kuasa Pengguna Anggaran,


Drs. Feri Anjalia Siagian, M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA 417793

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	322,810,000	322,810,000	0	0	25,104,821	(25,104,821)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	322,810,000	322,810,000	0	0	25,104,821	(25,104,821)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	322,810,000	322,810,000	0	0	25,104,821	(25,104,821)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	33,132,147,000	29,014,934,893	(4,117,212,107)	88	160,881,981,000	130,378,576,501	30,503,404,499	81
1. Belanja Pegawai	9,695,176,000	9,532,713,486	(162,462,514)	98	8,934,115,000	7,805,341,863	1,128,773,137	87
2. Belanja Barang	23,436,971,000	19,482,221,407	(3,954,749,593)	83	146,544,778,000	117,667,182,233	28,877,595,767	80
3. Belanja Modal	0	0	0	0	5,403,088,000	4,906,052,405	497,035,595	91
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115
ESELON I : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum 01
SATUAN KERJA : SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA 417793

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

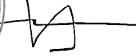
URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	33,132,147,000	29,014,934,893	(4,117,212,107)	88	160,881,981,000	130,378,576,501	30,503,404,499	81
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN




FERI MULIA SIAGIAN
NIP 197502221994041001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3500
SATUAN KERJA : 417793
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 8:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	445,732,000	1,032,663,000	1,030,379,460	0	1,030,379,460	99.78	2,283,540
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	600,000	601,000	14,620	0	14,620	2.43	586,380
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	35,171,000	53,524,000	53,254,704	0	53,254,704	99.5	269,296
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	12,509,000	18,285,000	15,873,216	0	15,873,216	86.81	2,411,784
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	63,350,000	53,250,000	53,030,000	0	53,030,000	99.59	220,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	16,982,000	16,000,000	15,769,000	0	15,769,000	98.56	231,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	162,284,000	9,400,000	7,579,366	0	7,579,366	80.63	1,820,634
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	30,660,000	54,690,000	54,532,260	0	54,532,260	99.71	157,740
511129	Belanja Uang Makan PNS	186,480,000	239,252,000	224,989,000	0	224,989,000	94.04	14,263,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	33,530,000	51,535,000	50,435,000	370,100	50,064,900	97.15	1,470,100
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	987,298,000	1,529,200,000	1,505,856,626	370,100	1,505,486,526	98.45	23,713,474
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,596,852,000	2,976,000,000	2,975,713,832	0	2,975,713,832	99.99	286,168
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	2,596,852,000	2,976,000,000	2,975,713,832	0	2,975,713,832	99.99	286,168
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	807,308,000	1,475,222,000	1,470,788,052	0	1,470,788,052	99.7	4,433,948
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	200,000	200,000	21,552	0	21,552	10.78	178,448
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	40,364,000	88,000,000	87,420,640	0	87,420,640	99.34	579,360
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	11,662,000	23,623,000	22,386,240	0	22,386,240	94.76	1,236,760
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	34,020,000	92,370,000	92,205,000	0	92,205,000	99.82	165,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	40,880,000	81,100,000	80,748,300	0	80,748,300	99.57	351,700
511628	Belanja Uang Makan PPPK	159,840,000	280,304,000	260,879,000	0	260,879,000	93.07	19,425,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	38,850,000	56,645,000	54,155,000	0	54,155,000	95.6	2,490,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	1,133,124,000	2,097,464,000	2,068,603,784	0	2,068,603,784	98.62	28,860,216
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	75,000,000	25,000,000	14,888,000	0	14,888,000	59.55	10,112,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	54,610,000	48,300,000	19,406,000	0	19,406,000	40.18	28,894,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	129,610,000	73,300,000	34,294,000	0	34,294,000	46.79	39,006,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,016,798,000	1,525,725,000	1,463,323,701	0	1,463,323,701	95.91	62,401,299
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	836,388,000	1,493,487,000	1,485,291,643	0	1,485,291,643	99.45	8,195,357
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	1,853,186,000	3,019,212,000	2,948,615,344	0	2,948,615,344	97.66	70,596,656

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 3500
SATUAN KERJA : 417793
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 8:25 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	6,700,070,000	9,695,176,000	9,533,083,586	370,100	9,532,713,486	98.32	162,462,514
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,032,148,000	3,595,703,000	3,512,806,001	0	3,512,806,001	97.69	82,896,999
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,684,000	0	0	0	0		0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	111,120,000	183,732,000	158,354,800	0	158,354,800	86.19	25,377,200
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	165,817,000	465,409,000	449,559,600	0	449,559,600	96.59	15,849,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,314,769,000	4,244,844,000	4,120,720,401	0	4,120,720,401	97.08	124,123,599
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	114,945,000	1,061,976,000	733,149,936	0	733,149,936	69.04	328,826,064
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	260,700,000	225,000,000	0	225,000,000	86.31	35,700,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	53,000,000	53,000,000	0	53,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	114,945,000	1,375,676,000	1,011,149,936	0	1,011,149,936	73.5	364,526,064
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	34,960,000	10,000,000	1,945,500	0	1,945,500	19.45	8,054,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	34,960,000	10,000,000	1,945,500	0	1,945,500	19.45	8,054,500
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	204,000,000	179,192,000	161,870,538	0	161,870,538	90.33	17,321,462
522113	Belanja Langganan Air	60,000,000	39,027,000	22,711,275	0	22,711,275	58.19	16,315,725
522131	Belanja Jasa Konsultan	0	12,500,000	0	0	0	0	12,500,000
522141	Belanja Sewa	1,913,400,000	1,914,950,000	1,869,450,000	0	1,869,450,000	97.62	45,500,000
522151	Belanja Jasa Profesi	32,400,000	192,400,000	151,700,900	0	151,700,900	78.85	40,699,100
522191	Belanja Jasa Lainnya	0	749,002,000	625,900,000	0	625,900,000	83.56	123,102,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	2,209,800,000	3,087,071,000	2,831,632,713	0	2,831,632,713	91.73	255,438,287
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	129,000,000	911,366,000	904,244,750	0	904,244,750	99.22	7,121,250
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	832,410,000	483,000,000	424,437,004	0	424,437,004	87.88	58,562,996
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	961,410,000	1,394,366,000	1,328,681,754	0	1,328,681,754	95.29	65,684,246
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,289,120,000	6,817,810,000	5,384,206,293	0	5,384,206,293	78.97	1,433,603,707
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,400,000	263,260,000	187,037,911	0	187,037,911	71.05	76,222,089
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	327,850,000	1,758,374,000	1,719,939,968	360,000	1,719,579,968	97.79	38,794,032
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	868,780,000	4,485,570,000	2,897,266,931	0	2,897,266,931	64.59	1,588,303,069
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	4,500,150,000	13,325,014,000	10,188,451,103	360,000	10,188,091,103	76.46	3,136,922,897

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : 01 Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : 3500 KALIMANTAN UTARA
SATUAN KERJA : 417793 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 07/05/26 8:25 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 7/5/26 8:04 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,136,034,000	23,436,971,000	19,482,581,407	360,000	19,482,221,407	83.13	3,954,749,593
	JUMLAH BELANJA	17,836,104,000	33,132,147,000	29,015,664,993	730,100	29,014,934,893	87.57	4,117,212,107

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : 01 **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : 3500 **KALIMANTAN UTARA**
SATUAN KERJA : 417793 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 07/05/26 8:25 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	246,010,000	0	246,010,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	246,010,000	0	246,010,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	76,800,000	0	76,800,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	76,800,000	0	76,800,000	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	322,810,000	0	322,810,000	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	322,810,000	0	322,810,000	

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (417793) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas Lainnya dan Setara Kas	13,600	15,376,161,352	(15,376,147,752)	(100.00)
Persediaan	0	4,785,000	(4,785,000)	(100.00)
JUMLAH ASET LANCAR	13,600	15,380,946,352	(15,380,932,752)	(100.00)
ASET TETAP				
Tanah	243,973,332	243,973,332	0	0.00
Peralatan dan Mesin	11,092,574,304	12,553,856,104	(1,461,281,800)	(11.64)
Aset Tetap Lainnya	249,977,405	249,977,405	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(6,881,395,573)	(7,013,183,495)	131,787,922	(1.88)
JUMLAH ASET TETAP	4,705,129,468	6,034,623,346	(1,329,493,878)	(22.03)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	31,220,000	45,520,000	(14,300,000)	(31.41)
Aset Lain-lain	14,300,000	0	14,300,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(45,520,000)	(45,520,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	4,705,143,068	21,415,569,698	(16,710,426,630)	(78.03)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	50,600,336	91,884,205	(41,283,869)	(44.93)
Utang Jangka Pendek Lainnya	13,600	2,003,300	(1,989,700)	(99.32)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	50,613,936	93,887,505	(43,273,569)	(46.09)
JUMLAH KEWAJIBAN	50,613,936	93,887,505	(43,273,569)	(46.09)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	4,654,529,132	21,321,682,193	(16,667,153,061)	(78.17)
JUMLAH EKUITAS	4,654,529,132	21,321,682,193	(16,667,153,061)	(78.17)
JUMLAH EKUITAS	4,654,529,132	21,321,682,193	(16,667,153,061)	(78.17)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4,705,143,068	21,415,569,698	(16,710,426,630)	(78.03)

Keterangan :

FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



[Signature]

FERI MULIA SIAGIAN

NIP 197502221994041001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 115

UNIT ORGANISASI : 01

WILAYAH/PROVINSI : 3500

SATUAN KERJA : 417793

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tgl. Cetak 07/05/2026 8:25 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2,003,300	0
0.0	111822	Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	15,374,158,052	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	4,785,000	0
0.0	131111	Tanah	243,973,332	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	12,553,856,104	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	249,977,405	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	7,013,183,495
0.0	162151	Software	45,520,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	45,520,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	19,178,907
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	72,705,298
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	2,003,300
0.0	391111	Ekuitas	0	21,321,682,193
JUMLAH			28,474,273,193	28,474,273,193

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (417793) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	13,600	0
0.0	131111	Tanah	243,973,332	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	11,092,574,304	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	249,977,405	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	6,881,395,573
0.0	162151	Software	31,220,000	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	14,300,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	31,220,000
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	14,300,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	48,893,036
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	1,707,300
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	13,600
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	18,592,119,789
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	322,810,000	0
0.0	313211	Transfer Keluar	1,330,467,664	0
0.0	391111	Ekuitas	0	21,321,682,193
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	1,774,800	0
0.0	391119	Koreksi Lainnya	3,748,918,206	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	246,010,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	76,800,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,035,558,660	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	15,553	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	53,815,784	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	16,110,596	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	53,030,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	16,262,030	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	8,512,165	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	54,242,580	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	231,789,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	49,879,900	0
3.0	511332	Beban Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,975,713,832	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	1,471,392,852	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	21,563	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	87,481,120	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	22,398,336	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	92,205,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	80,748,300	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (417793) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	282,433,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	54,155,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	14,888,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	19,406,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,460,395,701	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,481,972,643	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	3,509,840,548	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	154,098,800	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	449,559,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	733,149,936	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	225,000,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	53,000,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	155,979,324	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	23,326,144	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,869,450,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	151,700,900	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	625,900,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	904,244,750	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	424,437,004	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	5,346,706,093	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	182,987,911	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,702,629,968	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,897,266,931	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1,199,676,156	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	6,730,500	0
JUMLAH			47,214,141,491	47,214,141,491

Keterangan :

FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUALA PENGGUNA ANGGARAN



PEN MULLIA SIAGIAN

NIP 197502221994041001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (417793) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	29,014,934,893
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	322,810,000	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	246,010,000
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	76,800,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,030,379,460	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	14,620	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	53,254,704	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,873,216	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	53,030,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	15,769,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	7,579,366	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	54,532,260	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	224,989,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	50,435,000	0
3.0	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	2,975,713,832	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1,470,788,052	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	21,552	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	87,420,640	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	22,386,240	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	92,205,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	80,748,300	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	260,879,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	54,155,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	14,888,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	19,406,000	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1,463,323,701	0
3.0	512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,485,291,643	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,512,806,001	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	158,354,800	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	449,559,600	0
3.0	521211	Belanja Bahan	733,149,936	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	225,000,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	53,000,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1,945,500	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	161,870,538	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	22,711,275	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,869,450,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	151,700,900	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (417793) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	625,900,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	904,244,750	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	424,437,004	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,384,206,293	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	187,037,911	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,719,939,968	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,897,266,931	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	370,100
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	360,000
JUMLAH			29,338,474,993	29,338,474,993

Keterangan :

FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUALA PENGGUNA ANGGARAN



PERI MULIA SIAGIAN

197502221994041001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
ESELON I : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA
SATUAN KERJA : (417793) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	9,562,427,615	7,790,046,790	1,772,380,825	22.752
Beban Persediaan	6,730,500	598,493,100	(591,762,600)	(98.875)
Beban Barang dan Jasa	7,951,005,252	58,356,503,825	(50,405,498,573)	(86.375)
Beban Pemeliharaan	1,328,681,754	1,692,315,701	(363,633,947)	(21.487)
Beban Perjalanan Dinas	10,129,590,903	57,699,282,005	(47,569,691,102)	(82.444)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (115) **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
ESELON I : (01) **Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
WILAYAH/PROVINSI : (3500) **KALIMANTAN UTARA**
SATUAN KERJA : (417793) **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Tgl Data : 07/05/26 1:35 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1,199,676,156	1,052,943,642	146,732,514	13.935
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	30,178,112,180	127,189,585,063	(97,011,472,883)	(76.273)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(30,178,112,180)	(127,189,585,063)	97,011,472,883	(76.273)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	246,010,000	16,569,821	229,440,179	1,384.687
Pendapatan Pelepasan Aset	246,010,000	16,569,821	229,440,179	1,384.687
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76,800,000	18,535,000	58,265,000	314.351
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76,800,000	18,535,000	58,265,000	314.351
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	322,810,000	35,104,821	287,705,179	819.56
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(29,855,302,180)	(127,154,480,242)	97,299,178,062	(76.52)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(29,855,302,180)	(127,154,480,242)	97,299,178,062	(76.52)

Keterangan :
FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



[Handwritten signature]

ERI MULIA SIAGIAN
NIP 197502221994041001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (115) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

UNIT ORGANISASI : (01) Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

WILAYAH/PROVINSI : (3500) KALIMANTAN UTARA

SATUAN KERJA : (417793) SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM

Tgl Cetak : 07/05/26 8:24 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,321,682,193	27,627,911,703	(6,306,229,510)	(22.83)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(29,855,302,180)	(127,154,480,242)	97,299,178,062	(76.52)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(3,750,693,006)	8,010,000	(3,758,703,006)	(46,925.13)
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(1,774,800)	8,010,000	(9,784,800)	(122.16)
LAIN-LAIN	(3,748,918,206)	0	(3,748,918,206)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	16,938,842,125	120,840,240,732	(103,901,398,607)	(85.98)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(16,667,153,061)	(6,306,229,510)	(10,360,923,551)	164.3
EKUITAS AKHIR	4,654,529,132	21,321,682,193	(16,667,153,061)	(78.17)

Keterangan :

FINAL

TANJUNG SELOR, 7 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



ERI MULIA SIAGIAN

NIP 197502221994041001

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 417793 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:39 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		4,006	243,973,332	0	0	0	0	4,006	243,973,332
2010104999	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	M2	4,006	243,973,332	0	0	0	0	4,006	243,973,332
132111	Peralatan dan Mesin		771	12,553,856,104	0	0	97	1,461,281,800	674	11,092,574,304
3010304002	Portable Generating Set	Unit	6	307,000,000	0	0	1	45,400,000	5	261,600,000
3020101003	Station Wagon	Unit	16	7,554,576,000	0	0	3	985,260,000	13	6,569,316,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	308,357,000	0	0	0	0	1	308,357,000
3020104001	Sepeda Motor	Unit	6	154,810,000	0	0	0	0	6	154,810,000
3050102007	Mesin Penghitung Uang	Buah	1	3,960,000	0	0	0	0	1	3,960,000
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	Buah	1	57,156,000	0	0	0	0	1	57,156,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	Buah	18	75,607,300	0	0	2	8,000,000	16	67,607,300
3050104002	Lemari Kayu	Buah	35	71,980,000	0	0	6	11,820,000	29	60,160,000
3050104005	Filing Cabinet Besi	Buah	9	22,500,000	0	0	0	0	9	22,500,000
3050104007	Brandkas	Buah	8	65,475,000	0	0	1	11,100,000	7	54,375,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	Buah	6	119,600,000	0	0	1	9,920,000	5	109,680,000
3050105017	Mesin Absensi	Buah	6	17,135,500	0	0	1	2,943,100	5	14,192,400
3050105048	LCD Projector/Infocus	Buah	14	93,165,353	0	0	2	13,450,000	12	79,715,353
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Buah	10	31,000,000	0	0	1	3,100,000	9	27,900,000
3050201002	Meja Kerja Kayu	Buah	110	151,534,450	0	0	10	6,000,000	100	145,534,450
3050201003	Kursi Besi/Metal	Buah	156	160,134,000	0	0	25	10,950,000	131	149,184,000
3050201005	Sice	Buah	36	289,955,000	0	0	6	38,950,000	30	251,005,000
3050201008	Meja Rapat	Buah	6	46,690,000	0	0	1	6,450,000	5	40,240,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	Buah	13	4,355,000	0	0	0	0	13	4,355,000
3050204001	Lemari Es	Buah	1	5,000,000	0	0	0	0	1	5,000,000
3050204004	A.C. Split	Buah	43	310,311,980	0	0	5	38,750,000	38	271,561,980
3050204007	Exhause Fan	Buah	1	1,567,500	0	0	0	0	1	1,567,500
3050206002	Televisi	Buah	6	42,319,159	0	0	0	0	6	42,319,159
3050206008	Sound System	Buah	6	78,500,000	0	0	1	9,000,000	5	69,500,000
3050206036	Dispenser	Buah	2	4,042,385	0	0	0	0	2	4,042,385
3050206046	Handy Cam	Buah	2	32,436,315	0	0	0	0	2	32,436,315
3060101036	Microphone/Wireless MIC	Buah	1	2,109,000	0	0	0	0	1	2,109,000
3060101091	Digital LED Running Text	Buah	1	14,000,000	0	0	0	0	1	14,000,000
3060101098	Mixer Sound Sistem	unit	1	2,941,500	0	0	0	0	1	2,941,500
3060102012	Video Monitor	Buah	1	3,219,000	0	0	0	0	1	3,219,000
3060102045	Tripod Camera	Buah	1	1,942,500	0	0	0	0	1	1,942,500
3060102061	Lensa Kamera	Buah	3	44,648,000	0	0	0	0	3	44,648,000
3060102118	Head Set	Buah	2	10,767,000	0	0	0	1,972,000	2	8,795,000
3060102128	Camera Digital	Buah	14	213,401,000	0	0	2	15,570,200	12	197,830,800

**LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

UAPB : 115 **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
UAKPB : 417793 **SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Tgl Data : 07/05/26 6:36 AM
Tgl Cetak : 07/05/26 8:39 AM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_satker_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3060102165	Camera Conference	Buah	6	25,785,000	0	0	1	3,827,000	5	21,958,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	dummy	5	17,220,000	0	0	1	3,444,000	4	13,776,000
3100102001	P.C Unit	Buah	55	447,525,842	0	0	7	58,325,000	48	389,200,842
3100102002	Lap Top	Buah	79	1,296,345,528	0	0	9	128,864,500	70	1,167,481,028
3100102003	Note Book	Buah	2	68,154,000	0	0	0	0	2	68,154,000
3100102009	Tablet PC	Buah	1	15,344,000	0	0	0	0	1	15,344,000
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Buah	64	187,594,792	0	0	9	28,247,800	55	159,346,992
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Buah	15	159,191,000	0	0	2	19,938,200	13	139,252,800
3100204015	Firewall	Buah	1	34,500,000	0	0	0	0	1	34,500,000
135111	Aset Tetap Renovasi		2	249,977,405	0	0	0	0	2	249,977,405
6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	dummy	2	249,977,405	0	0	0	0	2	249,977,405
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		0	0	3	985,260,000	3	985,260,000	0	0
3020101003	Station Wagon	Unit	0	0	3	985,260,000	3	985,260,000	0	0
TOTAL				13,047,806,841		985,260,000		2,446,541,800		11,586,525,041

Tanjung Selor, 7 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
KEPALA SEKRETARIAT

PERTI MULIA SIAGIAN
197502221994041001

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-14
Kementerian Negara/Lembaga : 115 - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
Eselon 1 : 115.01 - Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum
Wilayah/Provinsi : 35.01 - KAB. BULUNGAN/KALIMANTAN UTARA
Satuan Kerja : 417793 - SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Halaman : 1
Tanggal Cetak : 07-05-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	33,132,147,000.00	29,015,304,993.00	87.57%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	33,132,147,000.00	29,015,304,993.00	87.57%							
CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	14,619,541,000.00	10,856,807,685.00	74.26%							
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	14,520,471,000.00	10,764,758,300.00	74.14%							
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	14,000,000.00	7,807,000.00	55.76%							
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	14,000,000.00	7,807,000.00	55.76%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	44.24%		
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	14,506,471,000.00	10,756,951,300.00	74.15%							
001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	334,740,000.00	334,136,196.00	99.82%	6.0000	Laporan	6.0000	100%	0.18%		
002	Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	7,984,867,000.00	5,055,604,491.00	63.31%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	36.69%		
003	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 01	2,783,593,000.00	2,640,103,461.00	94.85%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	5.15%		
004	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 02	1,373,831,000.00	788,256,928.00	57.38%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	42.62%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
005	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 03	1,097,124,000.00	1,064,154,372.00	96.99%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	3.01%		
006	Pengawasan Pemilihan Bupati/Wali Kota - Kabupaten/Kota 04	932,316,000.00	874,695,852.00	93.82%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	6.18%		
7013	Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	14,300,000.00	11,300,000.00	79.02%							
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	14,300,000.00	11,300,000.00	79.02%							
002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	14,300,000.00	11,300,000.00	79.02%	1.0000	Lembaga	1.0000	100%	20.98%		
7014	Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	84,770,000.00	80,749,385.00	95.26%							
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	84,770,000.00	80,749,385.00	95.26%							
002	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	84,770,000.00	80,749,385.00	95.26%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	4.74%		
WA	Program Dukungan Manajemen	18,512,606,000.00	18,158,497,308.00	98.09%							
4356	Pengelolaan Data dan Informasi	12,000,000.00	8,915,000.00	74.29%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	12,000,000.00	8,915,000.00	74.29%							
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	7,000,000.00	5,265,000.00	75.21%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	24.79%		
963	Layanan Data dan Informasi	5,000,000.00	3,650,000.00	73%	2.0000	Laporan	2.0000	100%	27%		
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, Dan Umum	16,184,426,000.00	15,842,700,545.00	97.89%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	15,409,041,000.00	15,077,310,084.00	97.85%							
956	Layanan BMN	1,000,000.00	455,000.00	45.5%	1.0000	Layanan	1.0000	100%	54.5%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
994	Layanan Perkantoran	15,408,041,000.00	15,076,855,084.00	97.85%	2.0000	Layanan	2.0000	100%	2.15%		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	775,385,000.00	765,390,461.00	98.71%							
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	586,325,000.00	581,692,861.00	99.21%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	0.79%		
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,000,000.00	0.00	0%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	100%		
955	Layanan Manajemen Keuangan	188,060,000.00	183,697,600.00	97.68%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	2.32%		
6850	Pengelolaan Organisasi Dan SDM	2,316,180,000.00	2,306,881,763.00	99.6%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,112,180,000.00	2,105,669,605.00	99.69%							
957	Layanan Hukum	4,000,000.00	2,840,000.00	71%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	29%		
962	Layanan Umum	2,106,180,000.00	2,102,529,605.00	99.83%	1.0000	Dokumen	1.0000	100%	0.17%		
969	Layanan Bantuan Hukum	2,000,000.00	300,000.00	15%	1.0000	Laporan	1.0000	100%	85%		
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	204,000,000.00	201,212,158.00	98.63%							
954	Layanan Manajemen SDM	204,000,000.00	201,212,158.00	98.63%	50.0000	Orang	50.0000	100%	1.37%		

**BERITA ACARA TRANSFER BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALINAU**

NOMOR : 75/PL.09/KL/12/2025

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (31-12-2025) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. Feri Mulia Siagian, A.P., M.Si
NIP : 19750222 199404 1 001
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Nama : Yulius, S.Sos., M.Si
NIP : 19690616 200604 1 008
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Barang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; dan
- c. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap berbasis Akrua.

PASAL 1

PIHAK KESATU menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima dengan baik atas Barang Milik Negara dengan total nilai Rp33.382.200,00 (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah), dengan rincian sebagaimana daftar terlampir.

PASAL 2

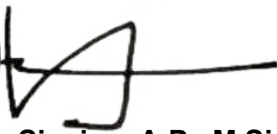
Selanjutnya **PIHAK KESATU** melakukan transaksi Transfer Keluar dan **PIHAK KEDUA** melakukan transaksi Transfer Masuk pada Aplikasi SAKTI atas BMN sebagaimana daftar terlampir.

PASAL 3

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Transfer Barang Milik Negara ini, maka wewenang dan tanggung jawab atas pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila terdapat kekeliruan dalam Berita Acara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Drs. Feri Mulia Siagian, A.P., M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

PIHAK KEDUA



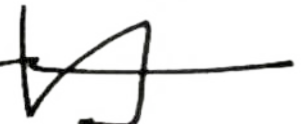
Yulius, S.Sos., M.Si
NIP. 19690616 200604 1 008

Lampiran Surat Keterangan
Nomor : 75/PL.09/KL/12/2025
Tanggal: 31 Desember 2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DILAKUKAN TRANSFER PADA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA KEPADA
SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN MALINAU

No.	Kode Barang	Nama Barang	Merek/Type	NUP	Qty	Tahun Perolehan	Nilai Satuan Barang (Rp)	Total Nilai Perolehan (Rp)	Nomor SK PSP	Keterangan
1	3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	Samsung Galaxy A05 S	2	1	2024	3.444.000	3.444.000	380/PL.09/K1/11/2024	Sudah digunakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Malinau
2	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L121	110-111	2	2024	2.000.000	4.000.000	252/PL.09/K1/11/2025	
3	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson L3250	112-113	2	2024	3.000.000	6.000.000	252/PL.09/K1/11/2025	
4	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Brother	9	1	2020	12.500.000	12.500.000	0474/Bawaslu/SJ/PL.07/XI/2020	
5	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Brother	14	1	2023	7.438.200	7.438.200	309/PL.09/K1/09/2023	
Total								33.382.200		

PIHAK KESATU



Drs. Feri Mulia Siagian, S.Sos., M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

PIHAK KEDUA



Yulius, S.Sos., M.Si
NIP. 19690616 200604 1 008

SURAT KETERANGAN
Nomor : 24/PL.09/KL/12/2025

Yang menerangkan di bawah ini:

Nama : Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si
NIP : 197502221994041001
Jabatan : Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara

dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Nomor B-2595/PL.09/SJ/12/2025 perihal Tindak Lanjut Pengelolaan BMN di Lingkungan Bawaslu terkait Temuan BPK, perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang pada aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap atas Barang Milik Negara (BMN) berupa Head Set (Peralatan Command Center) senilai Rp986.000,00 per unit pada aplikasi SAKTI satuan kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (417793). Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi pencatatan nilai berkurang sebagaimana terlampir.

Tanjung Selor , 15 Desember 2025

Kepala Sekretariat



Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001

Lampiran
Surat Keterangan Koreksi Perubahan Nilai Bertambah
Nomor : 24/PL.09/KL/12/2025
Tanggal: 15 Desember 2025

DAFTAR BMN YANG DILAKUKAN KOREKSI PERUBAHAN NILAI BERKURANG
PADA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	JUMLAH	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN SATUAN (Rp)			TOTAL NILAI KOREKSI (Rp)
						SEMULA	MENJADI	KOREKSI BERKURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	3060102118	Head Set	1	1	2024	5.383.500	4.397.500	986.000	986.000
2	3060102118	Head Set	2	1	2024	5.383.500	4.397.500	986.000	986.000
				2					1.972.000

Kepala Sekretariat



Drs. Feri Mulia Siagian, AP., M.Si
NIP. 19750222 199404 1 001



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

NOMOR 303/PL.08/K1/12/2025

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA
SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan surat Kepala KPKNL Tarakan Nomor S-88/MK/KNL.1303/2025 tanggal 7 Oktober 2025, telah disetujui untuk dilakukan penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dengan ketentuan penjualan dilaksanakan secara lelang;
- b. bahwa Barang Milik Negara yang dimaksud telah laku terjual sebagaimana dilaporkan dalam Salinan Risalah Lelang Nomor 109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025 dan Risalah Lelang Nomor 130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025 serta berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 70/PL.08/KL/11/2025 tanggal 20 November 2025, Nomor 71/PL.08/KL/11/2025 tanggal 20 November 2025, Nomor 72/PL.08/KL/12/2025 tanggal 19 Desember 2025 telah dilaksanakan serah terima barang dengan pemenang lelang;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu melakukan Penghapusan Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa Kendaraan Bermotor sebagai tindak lanjut dari Pemindahtanganan melalui penjualan secara lelang; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penghapusan Barang Milik negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926); dan
- 9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap berbasis Akrua;l;

2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 267/PL.09/K1/08/2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

3. bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1/PL.08/KL/12/2025 tanggal 18 Desember 2025 hal Permohonan Penerbitan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- PERTAMA : Menghapus Barang Milik Negara berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp985.260.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dari Daftar Barang Kuasa Pengguna Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara selaku Kuasa Pengguna Barang
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Inspektur Utama;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara; dan
5. Kepala KPKNL Tarakan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 29 Desember 2025

**a.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal,**



**Ferdinand Eskol Tiar Sirait
NIP. 197412011993031001**

Lampiran Surat Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor : 303/PL.08/K1/12/2025
Tanggal : 29 Desember 2025

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIHAPUSKAN DARI DAFTAR BARANG KUASA PENGGUNA
PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA

No	Kode Barang	NUP	Nama BMN	Merk/Type	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Nilai Limit (Rp)
1	3020101003	1	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova V M/T 2.0 Vin 2, Kijang Innova	2015	295.590.000	0	64.579.000
2	3020101003	2	Station Wagon	Toyota New Kijang Innova V M/T Lux Bensi, Kijang Innova Lux	2015	303.750.000	0	64.579.000
3	3020101003	4	Station Wagon	Toyota All New Hilux Double Cabin G M/T, Grand New Hilux 4x4 Diesel	2015	385.920.000	0	60.952.000
TOTAL						985.260.000	0	190.110.000

a.n. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Sekretaris Jenderal,



Ferdinand Eskol Tiar Sirait
NIP. 197412011993031001



SALINAN/GROSSE

RISALAH LELANG

NOMOR : 130/13.03/2025-01

TANGGAL : 15 Desember 2025

PEJABAT LELANG : Supyansyah Nyong Goni,S.H.

PENJUAL : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

TARAKAN

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 130/13.03/2025-01

-----Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (15-12-2025), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Supyansyah Nyong Goni, Sarjana Hukum, NIP 19720807 199403 1 003 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.6/2023 tanggal 30 Januari 2023, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-497/KNL.1303/2025 tanggal 12 Desember 2025 dilaksanakan Lelang Wajib Non Eksekusi Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, Jalan Halmahera No.175 Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Drs.Feri Mulia Siagian, AP.M.Si, NIP 19750222 199404 1 001, Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Tanjung Selor, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 95/PL.08/KL/10/2025 tanggal 30 November 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-377/1/KNL.1303/2025 tanggal 03 Desember 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-88/MK.6/KNL.1303/2025 Tanggal 07 Oktober 2025. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Rusdiansyah, Sarjana Ekonomi, NIP. 19781009 200902 1 001, Jabatan Kepala Bagian Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor NOMOR: 47/PL.09/KL/07/2025 Tanggal 31 Juli 2025 dan Nomor: 68/PL.08/KL/10/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Tarakan. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Hilux Double Cabin, Nomor Polisi : KU 8129 B, Tahun : 2015, Warna Putih, Nomor Rangka : MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin : 2KDU808097, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat. -----

Nilai Limit : Rp60.952.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jalan Jend.Sudirman No.28 Tanjung Selor. -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran/Tempelan tanggal 08 Desember 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang.../Lembar Kedua

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal.../Lembar Ketiga

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau

melampaui Nilai.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada

menerima uang.../Lembar Kelima

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Tarakan. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Hilux Double Cabin, Nomor Polisi : KU 8129 B, Tahun : 2015, Warna Putih, Nomor Rangka : MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin :2KDU808097, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat. -----

Harga Lelang ----- : Rp60.952.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Syaiful Bahri, NIK , Pegawai Negeri Sipil , beralamat di -----
----- Jalan Jelarai Raya Perum Korpri, RT.101/RW.037, -----
----- Kelurahan/Desa Tajung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung -----
----- Selor, Kabupaten Bulungan -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 130/13.03/2025-01 tanggal 15
Desember 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp60.952.000,00 (enam puluh juta
sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 26 (dua puluh enam) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Rusdiansyah,S.E.
NIP. 19781009 200902 1 001

Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 16 DEC 2025
Kepala KPKNL Tarakan



Ahmad Elazar
NIP 19740324 199402 1 003 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGERA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG TARAKAN
JL. HALMAHERA NO. 175, PAMUSIAN KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA, 77113
Telp. (0551) 21507

KUITANSI

Nomor: 250/RL-130/13.03/2025-01

Risalah Lelang Nomor : 130/13.03/2024-01 tanggal 15 Desember 2025

Sudah Terima dari : Syaiful Bahri. Alamat: Jalan Jelarai Raya Perumahan Korpri P.9 N0. 143 , Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. Nomor KTP 6404010308800001

Banyaknya Uang : Rp 62.181.040, 00 (Enam puluh dua juta seratus delapan puluh seribu empat puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang berupa Toyota Hilux Double Cabin di Kab. Bulungan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanjung Selor, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, sesuai BPKB nomor L-07596922, yang dilelang tanggal 15 Desember 2025 atas permohonan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dihadapan Pelelang KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG TARAKAN Supyansyah Nyong Goni

Perincian:		
Pokok Lelang	: Rp	60.952.000,00
Bea Lelang Pembeli (Tarif 2%)	: Rp	1.219.040,00
Bea Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	62.181.040,00

Mengetahui
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan



Sigit Luhur Pambudi

Kota Tarakan, 15 Desember 2025
Bendahara Penerimaan



Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor



DETAIL BARANG

Jenis Barang	Bukti Kepemilikan	Uraian
Bergerak - Kendaraan Bermotor	BPKB	Toyota Hilux Double Cabin warna PUTIH Nomor bukti kepemilikan L-07596922, Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanjung Selor Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor STNK: 12055124 Nomor Rangka: MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin: 2KDU808097, Nomor Polisi: KU 8129 B, Tahun: 2015, Warna: PUTIH



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820251215072633
Tanggal Billing : 15-12-2025 22:32:45
Tanggal Kedaluwarsa : 22-12-2025 22:32:45
Tanggal Bayar : **16-12-2025 06:42:04**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Tarakan
Kementerian/Lembaga : **015 - KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Eselon I : **09 - Ditjen Kekayaan Negara**
Satuan Kerja : **506364 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN**
Total Disetor : 1.219.040 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **251216002477**
NTPN : **9D1703CIFU6A13BP**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang
Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 1.219.040 (IDR)
Keterangan : Lelang Wajib Non Eksekusi BMN, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Risalah Lelang
: nomor RL-130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025, PL Supyansyah Nyong
Goni



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820251215072892
Tanggal Billing : 15-12-2025 22:39:40
Tanggal Kedaluwarsa : 22-12-2025 22:39:40
Tanggal Bayar : **16-12-2025 06:42:05**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kementerian/Lembaga : **115 - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
Unit Eselon I : **01 - Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
Satuan Kerja : **417793 - SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
Total Disetor : 60.952.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **251216002483**
NTPN : **9E0CA2G503JTK3JS**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 60.952.000 (IDR)
Keterangan : Hasil Bersih Lelang Wajib Non Eksekusi BMN, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,
Risalah Lelang nomor RL-130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025, PL
Supyansyah Nyong Goni



SALINAN/~~GROSSE~~

RISALAH LELANG

NOMOR : 109/13.03/2025-01

TANGGAL : 18 November 2025

PEJABAT LELANG : Supyansyah Nyong Goni,S.H.

PENJUAL : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Utara

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

TARAKAN

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 109/13.03/2025-01

-----Pada hari ini Selasa tanggal delapan belas bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (18-11-2025), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Supyansyah Nyong Goni, Sarjana Hukum, NIP 19720807 199403 1 003 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.6/2023 tanggal 30 Januari 2023, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-417/KNL.1303/2025 tanggal 17 November 2025 dilaksanakan Lelang Wajib Non Eksekusi Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, Jalan Halmahera No.175 Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Drs.Feri Mulia Siagian, AP.M.Si, NIP 19750222 199404 1 001, Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Tanjung Selor, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 69/PL.08/KL/10/2025 tanggal 14 Oktober 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-321/1/KNL.1303/2025 tanggal 05 November 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-88/MK.6/KNL.1303/2025 Tanggal 07 Oktober 2025. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Rusdiansyah, Sarjana Ekonomi, NIP. 19781009 200902 1 001, Jabatan Kepala Bagian Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor NOMOR: 47/PL.09/KL/07/2025 Tanggal 31 Juli 2025 dan Nomor: 68/PL.08/KL/10/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Tarakan. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi : KU 1275 B, Tahun : 2015, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka : MHFXW43G5F4096372, Nomor Mesin : 1TR8891985, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat. -----

Nilai Limit : Rp64.579.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jalan Jend. Sudirman No. 28, Tanjung Selor. -----

2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi : KU 1262 B, Tahun : 2015, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFXW43G1F4095199, Nomor Mesin : 1TR8857951, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat. -----

Nilai Limit : Rp64.579.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jalan Jend. Sudirman No. 28, Tanjung Selor. -----

3. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Hilux Double Cabin, Nomor Polisi : KU 8129 B, Tahun : 2015, Warna Putih, Nomor

Rangka :.../Lembar Kedua

Lembar kedua dari Risalah Lelang Nomor : 109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

Rangka : MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin :2KDU808097, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat. -----

Nilai Limit : Rp60.952.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jalan Jend.Sudirman No.28 Tanjung Selor. -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran/Tempelan tanggal 11 November 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran

peserta secara.../Lembar Ketiga

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----
2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----
2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----
3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan

lelang, maka.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang
lelang oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran
melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan
aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja
pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang
melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari
pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka
waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan
secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa
kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat
dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau
melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh
saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang
atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang
atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai
pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut
dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab
sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi
lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam
penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan
hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi
dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang
dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan
pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan
lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan
ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan
(Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai
Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya

sebelum memenuhi.../Lembar Kelima

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Tarakan. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah enam puluh enam penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang

Lembar keenam dari Risalah Lelang Nomor : 109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi : KU 1275 B, Tahun : 2015, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka : MHFXW43G5F4096372, Nomor Mesin :1TR8891985, BPKB ada, STNK ada. Kondisi Rusak Berat. -----

Harga Lelang ----- : Rp100.979.000,00 (seratus juta sembilan ratus tujuh puluh
----- sembilan ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Ifrani, NIK 6371022606810011, Pegawai Negeri Sipil,
----- beralamat di Jalan Brigjen Hasan Basri Komp.Polsek BJM
----- Utara Jalur 3 No.13, RT.016/RW.001, Kelurahan Alalak
----- Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin,
----- Provinsi Kalimantan Selatan -----

2. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Kijang Innova, Nomor Polisi : KU 1262 B, Tahun : 2015, Warna Hitam Metalik, Nomor Rangka : MHFXW43G1F4095199, Nomor Mesin : 1TR8857951, BPKB ada, STNK ada. Kondisi Rusak Berat. -----

Harga Lelang ----- : Rp84.079.000,00 (delapan puluh empat juta tujuh puluh
----- sembilan ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Sukri Djuebang, NIK 3202111803770006, Wiraswasta,
----- beralamat di Jalan Moha Lasuloro Perum Griya Rindu Alam
----- Blok A/25, RT.094/RW.006, Kelurahan Antang, Kecamatan
----- Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan -----

3. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Hilux Double Cabin, Nomor Polisi : KU 8129 B, Tahun : 2015, Warna Putih, Nomor Rangka : MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin :2KDU808097, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat. -----

Harga Lelang ----- : Rp123.352.000,00 (seratus dua puluh tiga juta tiga ratus
----- lima puluh dua ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Hasrul Tahir, NIK 7371132010840012, Wiraswasta,
----- beralamat di Jalan Karaeng Makkawari Lorong 6,
----- RT.001/RW.001, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba
----- Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan -----

[illegible]

Banyaknya barang.../Lembar Terakhir

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 109/13.03/2025-01 tanggal 18 November 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 3 (tiga) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 3 (tiga) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp308.410.000,00 (tiga ratus delapan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 39 (tiga puluh sembilan) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual
Pejabat Lelang

Ttd.
Ttd.

Rusdiansyah,S.E.
NIP. 19781009 200902 1 001
Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

CATATAN:
Penunjukan Saudara Hasrul Tahir sebagai pembeli lelang dibatalkan sesuai surat Plh.Kepala KPKNL Tarakan Nomor : S-840/KNL.1303/2025 tanggal 26 November 2025 karena WANPRESTASI -----
Tarakan, 26 November 2025
Pejabat Lelang

Ttd.
Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 26 NOV 2025
Plh.Kepala KPKNL Tarakan


Aziz Kurniawan
NIP 19740428 199602 1 001



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820251126250052
Tanggal Billing : 26-11-2025 08:32:12
Tanggal Kedaluwarsa : 03-12-2025 08:32:12
Tanggal Bayar : **26-11-2025 10:03:05**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kementerian/Lembaga : **115 - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
Unit Eselon I : **01 - Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
Satuan Kerja : **417793 - SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
Total Disetor : 185.058.000 (IDR)
Terbilang : *Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Puluh Delapan Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **251126016545**
NTPN : **A2B7E2G503H8TEI4**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 100.979.000 (IDR)
Keterangan : Lelang Wajib Non Eksekusi BMN/BMD, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, RL-109/13.03/2025-01 Lot 1 tanggal 18 November 2025, PL Supyansyah Nyong Goni
Jenis Setoran : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 84.079.000 (IDR)
Keterangan : Lelang Wajib Non Eksekusi BMN/BMD, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, RL-109/13.03/2025-01 Lot 2 tanggal 18 November 2025, PL Supyansyah Nyong Goni



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820251126248292
Tanggal Billing : 26-11-2025 08:24:43
Tanggal Kedaluwarsa : 03-12-2025 08:24:43
Tanggal Bayar : **26-11-2025 10:03:06**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Tarakan
Kementerian/Lembaga : **015 - KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Eselon I : **09 - Ditjen Kekayaan Negara**
Satuan Kerja : **506364 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN**
Total Disetor : 3.701.160 (IDR)
Terbilang : *Tiga Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Seratus Enam Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **251126016547**
NTPN : **5593A2G503H8TCR4**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang
Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 2.019.580 (IDR)
Keterangan : Lelang Wajib Non Eksekusi BMN/BMD, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,
RL-109/13.03/2025-01 Lot 1 tanggal 18 November 2025, PL Supyansyah Nyong Goni
Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang
Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 1.681.580 (IDR)
Keterangan : Lelang Wajib Non Eksekusi BMN/BMD, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,
RL-109/13.03/2025-01 Lot 2 tanggal 18 November 2025, PL Supyansyah Nyong Goni



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGERA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG TARAKAN
JL. HALMAHERA NO. 175, PAMUSIAN KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA, 77113
Telp. (0551) 21507

KUITANSI

Nomor: 224/RL-109/13.03/2025-01

Risalah Lelang Nomor : 109/13.03/2025 tanggal 18 November 2025

Sudah Terima dari : ifrani. Alamat: Jl. Brigjen Hasan Basri Komp. Polsek Bjm Utara Jalur 3 No.13
Rt.016 Rw.001, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nomor KTP
6371022606810011

Banyaknya Uang : Rp 103.008.580, 00 (Seratus tiga juta delapan ribu lima ratus delapan puluh
rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang berupa Station Wagon di Kab.
Bulungan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanjung Selor, Kelurahan
Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, sesuai BPKB nomor L-
10577567, yang dilelang tanggal 18 November 2025 atas permohonan
Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dihadapan Pelelang KANTOR
PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG TARAKAN Supyansyah
Nyong Goni

Perincian:

Pokok Lelang	: Rp	100.979.000,00	
Bea Lelang Pembeli (Tarif 2%)	: Rp	2.019.580,00	
Bea Materai	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	103.008.580,00	

Mengetahui
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan



Sigit Luhur Pambudi

Kota Tarakan, 18 November 2025
Bendahara Penerimaan



Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor



DETAIL BARANG

Jenis Barang	Bukti Kepemilikan	Uraian
Bergerak - Kendaraan Bermotor	BPKB	Station Wagon warna ABU - ABU METALIK Nomor bukti kepemilikan L-10577567, Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanjung Selor Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor STNK: 12051000.C Nomor Rangka: MHFXW43G5F4096372, Nomor Mesin: 1TR8891985, Nomor Polisi: KU 1275 B, Tahun: 2015, Warna: ABU - ABU METALIK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGERA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG TARAKAN
JL. HALMAHERA NO. 175, PAMUSIAN KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA, 77113
Telp. (0551) 21507

KUITANSI

Nomor: 225/RL-109/13.03/2025-01

Risalah Lelang Nomor : 109/13.03/2025 tanggal 18 November 2025

Sudah Terima dari : Sukri djuebang. Alamat: Jalan Moha Lasuloro Perum Griya Rindu Alam Blok A No 25, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Nomor KTP 3202111803770006

Banyaknya Uang : Rp 85.770.580, 00 (Delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang berupa Station Wagon di Kab. Bulungan, beralamat di Jl. Jend Sudirman No. 28, Tanjung Selor, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, sesuai BPKB nomor L-10577568, yang dilelang tanggal 18 November 2025 atas permohonan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dihadapan Pelelang KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG TARAKAN Supyansyah Nyong Goni

Perincian:

Pokok Lelang	: Rp	84.079.000,00	
Bea Lelang Pembeli (Tarif 2%)	: Rp	1.681.580,00	
Bea Materai	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	85.770.580,00	

Mengetahui
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan



Sigit Luhur Pambudi

Kota Tarakan, 19 November 2025
Bendahara Penerimaan



Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor



*) Lampiran 225/RL-109/13.03/2025-01

DETAIL BARANG

Jenis Barang	Bukti Kepemilikan	Uraian
Bergerak - Kendaraan Bermotor	BPKB	Station Wagon warna HITAM METALIK Nomor bukti kepemilikan L-10577568, Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 28, Tanjung Selor Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor STNK: 12055123.C Nomor Rangka: MHFXW43G1F4095199, Nomor Mesin: 1TR8857951, Nomor Polisi: KU 1262 B, Tahun: 2015, Warna: HITAM METALIK



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820251126246021
Tanggal Billing	: 26-11-2025 08:08:11
Tanggal Kedaluwarsa	: 03-12-2025 08:08:11
Tanggal Bayar	: 26-11-2025 10:00:09
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar	: Internet Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Bendahara Penerimaan KPKNL Tarakan
Kementerian/Lembaga	: 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I	: 09 - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja	: 506364 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
Total Disetor	: 12.190.400 (IDR)
Terbilang	: <i>Dua Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus (IDR)</i>
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 251126016252
NTPN	: 7AF651JNG8USGAK5

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - E.Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang Wanprestasi - 1.Lelang Eksekusi dan Noneksekusi Wajib
Kode Akun	: 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran	: 12.190.400 (IDR)
Keterangan	: UJL Lelang Wanprestasi, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Risalah Lelang nomor RL-109/13.03/2025-01 Lot 3 tanggal 18 November 2025 a.n. Hasrul Tahir, PL Supyansyah Nyong Goni



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN
JALAN HALMAHERA NOMOR 175, PAMUSIAN, TARAKAN TENGAH, KOTA TARAKAN, KALIMANTAN UTARA 77113;
TELEPON (0551) 3803588; FAKSIMILE (0551) 3814971; LAMAN www.djkn.kemenkeu.go.id

Nomor : S-840/KNL.1303/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Pemberitahuan Pembatalan Penunjukan Pembeli

26 November 2025

Yth. Saudara Hasrul Tahir
Jalan Karaeng Makkawari Lorong 6, RT.001/RW.001, Kelurahan Samata, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan pelaksanaan lelang pada tanggal 18 November 2025, bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, Jalan Halmahera No.175 Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, atas permohonan lelang dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Risalah Lelang Nomor : RL-109/13.03/2025-01 Tanggal 18 November 2025, dengan objek lelang :

- 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Hilux Double Cabin, Nomor Polisi : KU 8129 B, Tahun : 2015, Warna Putih, Nomor Rangka : MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin : 2KDU808097, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan ini kami beritahukan bahwa penunjukan Saudara selaku Pembeli Lelang telah **DIBATALKAN** oleh Pejabat Lelang.

Demikian kami sampaikan agar Saudara maklum.

Plh.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara Dan Lelang Tarakan



Ditandatangani secara elektronik
Aziz Kurniawan

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Kepala Seksi Kepatuhan Internal
3. Kepala Pelelang Ahli Pertama Pelelang Ahli Pertama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan
4. Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
TARAKAN**

JALAN HALMAHERA, PAMUSIAN, KOTA TARAKAN, KALIMANTAN UTARA 77113
TELEPON (0551) 3813838, FAKSIMILE (0551) 3814971, SUREL kpknltarakan@kemenkeu.go.id

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN PENUNJUKAN PEMBELI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP : 19720807 199403 1 003
Jabatan : Pejabat Lelang Kelas I (Pelelang Ahli Pertama)
Kantor : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan

Dengan ini menyatakan bahwa penunjukan Saudara Hasrul Tahir, NIK 7371132010840012, Wiraswasta, beralamat di Jalan Karaeng Makkawari Lorong 6, RT.001/RW.001, Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selaku pemenang lelang pada :

Hari/Tanggal : Selasa/18 November 2025
Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Tarakan, Jalan Halmahera No.175 Pamusian, Tarakan
Tengah, Kota Tarakan
Penjual : Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara
Risalah Lelang Nomor : RL-109/13.03/2025-01
Objek Lelang : 1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon),
Merk/Type Toyota Hilux Double Cabin, Nomor Polisi : KU
8129 B, Tahun : 2015, Warna Putih, Nomor Rangka :
MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin : 2KDU808097,
BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat.

DIBATALKAN, mengingat sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak melunasi pembayaran harga lelang.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tarakan, 26 November 2025
Pejabat Lelang Kelas I

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP. 19720807 199403 1 003



SALINAN/GROSSE

RISALAH LELANG

NOMOR	: 130/13.03/2025-01
TANGGAL	: 15 Desember 2025
PEJABAT LELANG	: Supyansyah Nyong Goni,S.H.
PENJUAL	: Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

TARAKAN

Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

**SALINAN
RISALAH LELANG**
Nomor 130/13.03/2025-01

-----Pada hari ini Senin tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima (15-12-2025), dimulai pukul sepuluh (10:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Supyansyah Nyong Goni, Sarjana Hukum, NIP 19720807 199403 1 003 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13/KM.6/2023 tanggal 30 Januari 2023, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-497/KNL.1303/2025 tanggal 12 Desember 2025 dilaksanakan Lelang Wajib Non Eksekusi Barang Milik Negara bertempat di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, Jalan Halmahera No.175 Pamusian, Tarakan Tengah, Kota Tarakan. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan Drs.Feri Mulia Siagian, AP.M.Si, NIP 19750222 199404 1 001, Jabatan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, berkedudukan di Tanjung Selor, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor 95/PL.08/KL/10/2025 tanggal 30 November 2025, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor JL-377/1/KNL.1303/2025 tanggal 03 Desember 2025 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-88/MK.6/KNL.1303/2025 Tanggal 07 Oktober 2025. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Rusdiansyah, Sarjana Ekonomi, NIP. 19781009 200902 1 001, Jabatan Kepala Bagian Administrasi berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor NOMOR: 47/PL.09/KL/07/2025 Tanggal 31 Juli 2025 dan Nomor: 68/PL.08/KL/10/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Tarakan. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Hilux Double Cabin, Nomor Polisi : KU 8129 B, Tahun : 2015, Warna Putih, Nomor Rangka : MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin : 2KDU808097, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat. -----

Nilai Limit : Rp60.952.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) -----

Barang bergerak tersebut saat ini berada di Jalan Jend.Sudirman No.28 Tanjung Selor. -----

dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran/Tempelan tanggal 08 Desember 2025. -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jis. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang.../Lembar Kedua

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. ----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

----Dalam hal.../Lembar Ketiga

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----

1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----

----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----

----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----

----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----

----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau

melampaui Nilai.../Lembar Keempat

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni, S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----

-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----

-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----

-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. -----

-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----

-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----

-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----

-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----

-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----

-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----

-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----

-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada

menerima uang.../Lembar Kelima

Pejabat Lelang

Ttd.

Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Tarakan. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Sesudah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

-----Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah satu penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

-----Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (Satu) Unit Kendaraan Roda Empat (Station Wagon), Merk/Type Toyota Hilux Double Cabin, Nomor Polisi : KU 8129 B, Tahun : 2015, Warna Putih, Nomor Rangka : MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin :2KDU808097, BPKB ada, STNK ada, Kondisi Rusak Berat. -----

Harga Lelang ----- : Rp60.952.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Syaiful Bahri, NIK , Pegawai Negeri Sipil , beralamat di -----
----- Jalan Jelarai Raya Perum Korpri, RT.101/RW.037, -----
----- Kelurahan/Desa Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung -----
----- Selor, Kabupaten Bulungan -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 130/13.03/2025-01 tanggal 15
Desember 2025

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/telah terjual: Rp60.952.000,00 (enam puluh juta
sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 26 (dua puluh enam) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd.

Ttd.

Rusdiansyah,S.E.
NIP. 19781009 200902 1 001

Supyansyah Nyong Goni,S.H.
NIP 19720807 199403 1 003

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 16 DEC 2025
Kepala KPKNL Tarakan



Ahmad Elazar
NIP 19740324 199402 1 003 1



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGERA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGERA
KALIMANTAN TIMUR
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG TARAKAN
JL. HALMAHERA NO. 175, PAMUSIAN KOTA TARAKAN KALIMANTAN UTARA, 77113
Telp. (0551) 21507

KUITANSI

Nomor: 250/RL-130/13.03/2025-01

Risalah Lelang Nomor : 130/13.03/2024-01 tanggal 15 Desember 2025

Sudah Terima dari : Syaiful Bahri. Alamat: Jalan Jelarai Raya Perumahan Korpri P.9 NO. 143 , Kab. Bulungan, Kalimantan Utara. Nomor KTP 6404010308800001

Banyaknya Uang : Rp 62.181.040, 00 (Enam puluh dua juta seratus delapan puluh seribu empat puluh rupiah)

Keterangan : Pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang berupa Toyota Hilux Double Cabin di Kab. Bulungan, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanjung Selor, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, sesuai BPKB nomor L-07596922, yang dilelang tanggal 15 Desember 2025 atas permohonan Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara dihadapan Pelelang KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGERA DAN LELANG TARAKAN Supyansyah Nyong Goni

Perincian:		
Pokok Lelang	: Rp	60.952.000,00
Bea Lelang Pembeli (Tarif 2%)	: Rp	1.219.040,00
Bea Materai	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	62.181.040,00

Mengetahui
Atasan Langsung Bendahara Penerimaan



Sigit Luhur Pambudi

Kota Tarakan, 15 Desember 2025
Bendahara Penerimaan



Theresa Yosephine Ronauli Tumanggor



DETAIL BARANG

Jenis Barang	Bukti Kepemilikan	Uraian
Bergerak - Kendaraan Bermotor	BPKB	Toyota Hilux Double Cabin warna PUTIH Nomor bukti kepemilikan L-07596922, Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 28, Tanjung Selor Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Nomor STNK: 12055124 Nomor Rangka: MR0KS8CD3F1101537, Nomor Mesin: 2KDU808097, Nomor Polisi: KU 8129 B, Tahun: 2015, Warna: PUTIH



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820251215072633
Tanggal Billing : 15-12-2025 22:32:45
Tanggal Kedaluwarsa : 22-12-2025 22:32:45
Tanggal Bayar : **16-12-2025 06:42:04**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Tarakan
Kementerian/Lembaga : **015 - KEMENTERIAN KEUANGAN**
Unit Eselon I : **09 - Ditjen Kekayaan Negara**
Satuan Kerja : **506364 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TARAKAN**
Total Disetor : 1.219.040 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **251216002477**
NTPN : **9D1703CIFU6A13BP**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang
Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782-Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 1.219.040 (IDR)
Keterangan : Lelang Wajib Non Eksekusi BMN, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, Risalah Lelang
: nomor RL-130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025, PL Supyansyah Nyong
Goni



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820251215072892
Tanggal Billing : 15-12-2025 22:39:40
Tanggal Kedaluwarsa : 22-12-2025 22:39:40
Tanggal Bayar : **16-12-2025 06:42:05**
Bank/Pos/Fintech Bayar : **BANK RAKYAT INDONESIA**
Channel Bayar : **Internet Banking**
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Kementerian/Lembaga : **115 - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
Unit Eselon I : **01 - Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum**
Satuan Kerja : **417793 - SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**
Total Disetor : 60.952.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **251216002483**
NTPN : **9E0CA2G503JTK3JS**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pemindahtanganan BMN - Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122-Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 60.952.000 (IDR)
Keterangan : Hasil Bersih Lelang Wajib Non Eksekusi BMN, Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,
Risalah Lelang nomor RL-130/13.03/2025-01 tanggal 15 Desember 2025, PL
Supyansyah Nyong Goni